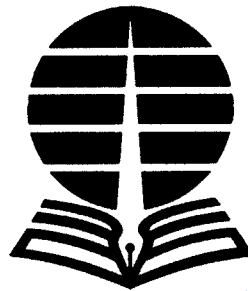


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKSI DESA  
MANDIRI PANGAN MELALUI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) DI DESA PELAIK  
KECAMATAN KAYAN HILIR  
KABUPATEN SINTANG**



**TAPM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**SONNY WIJAYA**

**NIM : 014965793**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2009**

**ABSTRAK****Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan  
Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)  
di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir****Sonny Wijaya****Universitas Terbuka****sonymap@yahoo.com****Kata Kunci: Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan  
Modal Usaha Kelompok (PMUK)**

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan telah digulirkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Salah satu Desa di Kabupaten Sintang yang menjadi sasaran Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir.

Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan secara efektif. Indikasi hal tersebut adalah kelompok afinitas belum menjadi kelompok mandiri dalam melakukan usaha produktif dan ketahanan pangan sehingga belum berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan), Tim Pangan Desa belum berperan sebagai lembaga koordinasi ketahanan pangan desa, Lembaga Keuangan Desa belum terbentuk serta aksesibilitas (permodalan, pemasaran, informasi, teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan usaha belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Faktor-faktor yang melingkupi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik diantaranya adalah partisipasi masyarakat. Jenis partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah partisipasi dalam penyediaan tenaga, namun kontrol/pengawasan serta penilaian masyarakat belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, peran pendamping dan penyuluh dalam implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan optimal.

**ABSTRACT****The implementation of the policy of the program of self-supporting countryside action of food through reinforcement of group's capital employed (PMUK) in Pelaik countryside, Kayan Hilir sub district****Sonny Wijaya****Universitas Terbuka****sonymap@yahoo.com****Keyword: The Program of Self-Supporting Countryside Action of Food through Reinforcement of Group's Capital Employed (PMUK)**

As follow up Law No. 7 of 1996 about food and Governmental Regulation No. 68 of 2002 about food resilience, it has been launched the program of self-supporting countryside action of food. One of the country sides in Sintang reGENCY which is the target of the program of self-supporting countryside action of food is Pelaik countryside, Kayan Hilir sub district.

The implementation process of the policy of the program of self-supporting countryside action of food through reinforcement of group's capital employed (PMUK) in Pelaik countryside, Kayan Hilir sub district in creating the food resilience in countryside level is Rp. 40.000.000 in cash. Such capital is used based on the potency of the countryside society and on the chance of the availability of the food to make the society prosperous. The group's effort plan of five self-supporting countrysides of food in Pelaik is chicken livestock. Based on the result of research, the process of society empowerment in the implementation of such policy has not run optimally.

One of the factors of the implementation of the policy of the program of self-supporting countryside action of food through reinforcement of group's capital employed (PMUK) in Pelaik countryside is the participation of society. The kind of the highest participation of society is the participation in providing the personnel, but the control and the society assessment have not run optimally. The participation of society in making the decision has not run properly. Moreover, the role of the tutor and the extension agent in the implementation process of the policy of the program of self-supporting countryside action of food through reinforcement of group's capital employed (PMUK) in Pelaik countryside has not run optimally, too.

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, .....

Yang Menyatakan



**SONNY WIJAYA**  
**NIM. 014965793**

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) DI DESA PELAIK KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG.**

Penyusun TAPM : **SONNY WIJAYA**

NIM : **014 965 793**

Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Hari/Tanggal :

**Menyetujui :**

Pembimbing II,

Dr. I. Nengah Baskara Wisnu Tedia, M.Ec  
Nip. 19581110 1986001

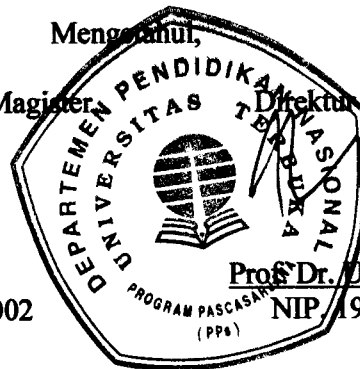
Pembimbing I,

Dr. Hernawan Harsono, SE.MS.AK  
Nip. 19580815 1987030 1 001

Mengesahul,

Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister  
Administrasi Publik.

Dra. Susanti, M.Si  
Nip.19671214 199303 2 002



Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA  
NIP. 1945007 197302 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PACASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : **SONNY WIJAYA**  
 NIM : **014965793**  
 Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**  
 Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKSI DESA  
 MANDIRI PANGAN MELALUI PENGUATAN MODAL  
 USAHA KELOMPOK (PUMK) DI DESA PELAIK  
 KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG.**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : **Senin / 14 Desember 2009**

Waktu : **13.00 – 15.00 WIB**

Dan telah dinyatakan : **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
**Ir. Edward Zubir, MM.**

: .....

Penguji Ahli  
**Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc**

: .....

Pembimbing I  
**Dr. Hernawan Harsono, SE.MS.AK.**

: .....

Pembimbing II  
**Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, M.Ec**

: .....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Selesaiannya penulisan tesis ini, juga dikarenakan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
2. Ir. Edward Zubir, MM selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
3. Dra. Susanti, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik, atas arahan dan bimbingan.
4. Dr. Hernawan Harsono, SE, MS.AK selaku Pembimbing Pertama penulisan Tesis ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
5. Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, ME.c selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.

7. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
8. Bapak Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
9. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang
11. Ketua Pokja Desa Mapan Kabupaten Sintang
12. Camat Kayan Hilir
13. Kepala Desa Pelaik beserta warga masyarakat dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.
14. Kedua Orang Tua saya M.Nurkasim, Martha Paseru, saudara saya Djunaedi, Candra Hasan,SE, Khalid Mustaid, Reski Henrayani,SE serta Istri, anak saya yang tercinta Ir. Aisyah, M. Asri S.W, M.Akmal K.W, Raihana Putri Wijaya
15. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Januari 2010

Penulis

**SONNY WIJAYA**  
**NIM. 014965793**



## DAFTAR ISI

|  | Hal  |
|--|------|
| ABSTRAK.....   | i    |
| ABSTRACT.....  | ii   |
| KATA PENGANTAR.....  | iii  |
| DAFTAR ISI.....  | v    |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vii  |
| DAFTAR TABEL.....  | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xiii |
| <br>   |      |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....   | 10   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 11   |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 11   |
| <br>   |      |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....  | 13   |
| A. Tinjauan Teoritik.....  | 13   |
| B. Kerangka Berpikir.....  | 37   |
| C. Defenisi Konsep Dan Operasional.....  | 38   |
| <br>   |      |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....   | 42   |
| A. Desain Penelitian.....  | 42   |
| B. Subjek Penelitian.....  | 43   |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....  | 44   |
| D. Alat Pengumpul Data .....   | 45   |
| E. Analisis Data.....  | 45   |
| F. Lokasi Penelitian.....  | 46   |
| <br>   |      |
| BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....  | 47   |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Kayan Hilir.....  | 47   |
| B. Gambaran Umum Desa Pelaik.....  | 50   |
| C. Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa<br>Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha<br>Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan<br>Hilir Kabupaten Sintang..... | 53   |

|  |            |
|--|------------|
| D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang..... | 107        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>121</b> |
| A. Simpulan.....   | 121        |
| B. Saran.....  | 122        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>123</b> |
| <b>Lampiran:</b>   |            |
| 1. Pedoman Wawancara   |            |
| 2. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)   |            |
| 3. Transkrip Pedoman Wawancara   |            |
| 4. Transkrip Kuesioner   |            |
| 5. Biodata   |            |
| 6. Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)   |            |
| 7. Surat Keterangan Izin Penelitian  |            |

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>Gambar</b> |  | <b>Hal</b> |
|---------------|--|------------|
| Gambar 2.1.   | Kerangka Berpikir .....                            | 37         |
| Gambar 4.1.   | Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pelaik ..... | 52         |

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR TABEL

| Tabel      |   | Hal |
|------------|---|-----|
| Tabel 1.1. | Lokasi Kecamatan Dan Jumlah Sasaran Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Sintang Th. 2006, 2007, 2008 Dan 2009  | 6   |
| Tabel 1.2. | Penduduk Kecamatan Kayan Hilir Menurut Persentase Keluarga Pertanian Tahun 2008   | 7   |
| Tabel 1.3. | Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya Di Desa Pelaik Tahun 2008   | 8   |
| Tabel 1.4. | Luas Lahan Kering Menurut Jenisnya Di Desa Pelaik Tahun 2008  | 9   |
| Tabel 1.5. | Perkembangan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik  | 10  |
| Tabel 4.1. | Luas wilayah masing-masing Desa di Kecamatan Kayan Hilir  | 48  |
| Tabel 4.2. | Nama-Nama Camat Yang Pernah / Masih Menjabat Di Kecamatan Kayan Hilir   | 49  |
| Tabel 4.3. | Penduduk Kecamatan Kayan Hilir Menurut Jenis Kelamin  | 50  |
| Tabel 4.4. | Penetapan Lokasi Desa Mandiri pangan Di Kabupaten Sintang   | 58  |
| Tabel 4.5. | Proses Rekrutmen dan Penetapan Tenaga Pendamping Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang  | 59  |
| Tabel 4.6. | Tugas Tenaga Pendamping Tahap Persiapan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang   | 60  |
| Tabel 4.7. | Jenis Kegiatan yang dilakukan Pendamping, Tim Pangan Desa dan Pokja Tingkat Kabupaten pada Desa Tahap Persiapan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang | 61  |
| Tabel 4.8. | Tugas Pendamping pada Tahap Penumbuhan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten  | 62  |

## Sintang

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Tabel 4.9.  | Tugas Pendamping pada Tahap Kemandirian Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang                      | 66 |
| Tabel 4.10. | Tugas Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Sosialisasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang   | 67 |
| Tabel 4.11. | Jadwal Sosialisasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang   | 68 |
| Tabel 4.12. | Pembentukan Dan Keanggotaan Tim Pangan Desa Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang                            | 69 |
| Tabel 4.13. | Tugas Tim Pangan Desa Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang  | 71 |
| Tabel 4.14. | Pembentukan dan Keanggotaan Pokja Kabupaten Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang                            | 73 |
| Tabel 4.15. | Realisasi Penyaluran PMUK Di Kabupaten Sintang   | 76 |
| Tabel 4.16. | Perkembangan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Sintang   | 82 |
| Tabel 4.17. | Pencapaian Tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik  | 87 |
| Tabel 4.18. | Strategis keberlanjutan program ( <i>Exit Strategis</i> ) Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik                            | 88 |
| Tabel 4.19. | Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | 89 |
| Tabel 4.20. | Perolehan Informasi Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK            | 89 |
| Tabel 4.21. | Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK                                | 91 |
| Tabel 4.22. | Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK                                    | 91 |
| Tabel 4.23. | Proses Diskusi Dengan Masyarakat Mengenai Kegiatan Apa   | 93 |

**Saja Yang Tepat Dilaksanakan Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Tabel 4.24.</b> | <b>Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>  | <b>93</b>  |
| <b>Tabel 4.25.</b> | <b>Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>  | <b>94</b>  |
| <b>Tabel 4.26.</b> | <b>Kerja Sama Antara Pendamping dan penyuluh Dan Warga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>                               | <b>95</b>  |
| <b>Tabel 4.27.</b> | <b>Suasana Atau Iklim Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Untuk Berkembang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>                     | <b>96</b>  |
| <b>Tabel 4.28.</b> | <b>Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Desa Pelaik</b>   | <b>97</b>  |
| <b>Tabel 4.29.</b> | <b>Upaya Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta Pendataan Potensi Yang Dimiliki Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b> | <b>98</b>  |
| <b>Tabel 4.30.</b> | <b>Keterlibatan Masyarakat Dalam Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta Pendataan Potensi Yang Dimiliki</b>  | <b>98</b>  |
| <b>Tabel 4.31.</b> | <b>Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun Permasalahan Dan Pendataan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Tabel 4.32.</b> | <b>Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>   | <b>100</b> |
| <b>Tabel 4.33.</b> | <b>Kontak Pendamping dan penyuluh Dengan Masyarakat Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>                                       | <b>101</b> |
| <b>Tabel 4.34.</b> | <b>Pendapat Warga Masyarakat Mengenai Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kelanjutan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>                              | <b>101</b> |
| <b>Tabel 4.35.</b> | <b>Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menggerakkan, Mengaktifkan, Mendorong Dan Mengembangkan Motivasi</b>   | <b>103</b> |

## Warga

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Tabel 4.36. | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menengahi Dan Mencari Titik Temu Yang Dapat Dikerjakan Bersama Oleh Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat                             | 103 |
| Tabel 4.37. | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Memanfaatkan Berbagai Keterampilan Dan Sumber Daya Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | 104 |
| Tabel 4.38. | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Mengorganisir (Membagi Tugas Dan Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK                   | 105 |
| Tabel 4.39. | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK                            | 106 |
| Tabel 4.40. | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menyampaikan Informasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK  | 107 |
| Tabel 4.41. | Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK   | 108 |
| Tabel 4.42. | Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Sumbangan Guna Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK  | 108 |
| Tabel 4.43. | Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK  | 109 |
| Tabel 4.44. | Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK   | 109 |
| Tabel 4.45. | Pemeliharaan/Perawatan Masyarakat Terhadap Fasilitas Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK                                    | 110 |
| Tabel 4.46. | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK  | 111 |
| Tabel 4.47. | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri   | 112 |

**Pangan melalui PMUK**

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| <b>Tabel 4.48.</b> | <b>Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Alat-Alat Perlengkapan Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>   | <b>113</b> |
| <b>Tabel 4.49.</b> | <b>Kesediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>                     | <b>114</b> |
| <b>Tabel 4.50.</b> | <b>Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan/Menyerap Dan Memberi Tanggapan Terhadap Informasi Yang Berknaan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b> | <b>115</b> |
| <b>Tabel 4.51.</b> | <b>Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>   | <b>115</b> |
| <b>Tabel 4.52.</b> | <b>Faktor-Faktor Penghambat/Pendukung Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>  | <b>116</b> |
| <b>Tabel 4.53.</b> | <b>Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>  | <b>118</b> |
| <b>Tabel 4.54.</b> | <b>Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK</b>   | <b>119</b> |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran    |  | Hal |
|-------------|--|-----|
| Lampiran 1  | Pedoman Wawancara ke Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang    | 1   |
| Lampiran 2  | Pedoman Wawancara ke Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang          | 1   |
| Lampiran 3  | Pedoman wawancara ke Ketua Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten Sintang | 1   |
| Lampiran 4  | Pedoman Wawancara ke Camat Kayan Hilir                                 | 1   |
| Lampiran 5  | Pedoman Wawancara ke Kepala Desa Pelaik                                | 1   |
| Lampiran 6  | Kuesioner  | 2   |
| Lampiran 7  | Transkrip Hasil Wawancara  | 3   |
| Lampiran 8  | Transkrip Hasi Kuesioner   | 4   |
| Lampiran 9  | Peraturan menteri Mertanian tentang Program Aksi Desa Mandiri Pangan   | 5   |
| Lampiran 10 | Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) dari UPBJJ-UT Pontianak  | 6   |
| Lampiran 11 | Ijin Penelitian dari Camat Kayan Hilir                                 | 7   |
| Lampiran 12 | Biodata  | 8   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kejadian kerawanan pangan di berbagai daerah di tanah air yang bersifat kronis terjadi sepanjang waktu dan transien yang terjadi secara mendadak. Kejadian kerawanan pangan kronis disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat menangani permasalahan kekurangan pangan yang disebabkan oleh kemiskinan. Secara relatif situasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 16,7 persen sedangkan pada tahun 2008 sebesar 15,4 persen, secara nominal jumlahnya masih cukup besar, sekitar 35 juta jiwa. Kejadian rawan pangan transien disebabkan oleh bencana alam maupun perbuatan manusia. Kejadian tersebut berakibat pada terjadinya kerawanan pangan karena berpengaruh negatif terhadap ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data tersebut maka fokus pembangunan pada saat ini masih diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan yang berada di pedesaan/perkotaan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan. Masalah pangan sudah menjadi keharusan untuk diimplimentasikan dan sudah menjadi kebijakan politik negara untuk memenuhi kebutuhan akan pangan,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, yang kemudian diberikan pengertian tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Upaya pemerintah dalam menghadapi ketersediaan pangan, yang salah satunya dikeluarkannya kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan di mana kontribusi/peranan sektor pertanian masih menjadi dominan sebagai pimpinan sektor-sektor yang lainnya (*Leading Sector*). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2008 sebesar 41,35 persen. Oleh karena itu, dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang, urusan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta peningkatan SDM petani dan penyuluh pertanian. Sedangkan urusan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan melalui penanganan daerah rawan pangan, pengembangan pertanian lahan kering, pengembangan daerah rawa lebak dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Dari kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang paling rentan berpengaruh pada masyarakat desa, hal itu



disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat desa dalam mengakses perubahan dan hal ini akan berbeda dengan kondisinya dengan ketidakmampuan masyarakat kota. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kemiskinan masyarakat kota dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi untuk menambah pendapatan, misalnya disebabkan oleh keterbatasan lahan perumahan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Sementara itu ketidak-mampuan masyarakat desa dipengaruhi keterbatasan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang cukup banyak, jadi persoalannya bukan pada sumber daya alam (*natural resources*) akan tetapi lebih banyak pada aspek sumber daya manusia (*human resources*) yang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk dijadikan sumber ekonomi untuk dikelola secara maksimal dalam menambah pendapatan, hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan terhadap alam yang begitu tinggi.

Harus diakui, pada umumnya masyarakat desa sangat terikat pada faktor produksi yang terikat pada sumber daya alam, karena itu hal yang paling pokok dalam menentukan kebijakan pembangunan di pedesaan berorientasi pada pengembangan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Dalam bahan rapat Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional pada tanggal 19 – 21 Juni 2006 di Makasar ada beberapa problema yang dihadapi petani dalam meningkatkan usaha taninya masih mewarnai pencapaian produksi tanaman pangan serta tingkat pendapatan petani. Berbagai permasalahan yang

perlu dicermati dalam mengatasi ketersediaan pangan maupun pengembangan agribisnis (Rapat kerja, 2006:1-2) antara lain:

- a. Lemahnya penerapan teknologi, seperti penggunaan varietas unggul, teknik budidaya pertanian, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit, pengaturan / tata guna air, intensitas pertanaman, panen dan pasca panen yang masih rendah, karena proses produksi belum terpenuhi secara lengkap dan sesuai anjuran.
- b. Pengaturan pola tanam yang tepat dan berlaku di daerah setempat belum terdata secara baik dan berkelanjutan untuk dapat dijadikan acuan.
- c. Fluktuasi harga komoditi tanaman pangan yang selalu berubah sesuai dengan mekanisme pasar akibat dari hukum permintaan dan penawaran.
- d. Tingkat permodalan di kelompok tani masih lemah dan pengelolaan permodalan belum berjalan dengan baik.
- e. Fasilitas permodalan melalui kredit program belum dapat dilaksanakan oleh petani karena persyaratan yang sulit dipenuhi, karena bukan merupakan kredit program.
- f. Pemahaman oleh petugas tentang tingkat sosial budaya dan tradisi masyarakat yang masih memberikan peluang belum diberdayakan secara optimal.
- g. Belum seluruhnya aktivitas petani menggambarkan kehidupan kelompok secara aktif dan kontinu.
- h. Kemampuan daya serap (absorpsi) masyarakat terhadap inovasi baru masih lamban dan tidak berkelanjutan, Hal ini antara lain disebabkan masih



lemahnya tingkat Sumber Daya Manusia atau kurangnya informasi dalam percontohan yang dibutuhkan oleh petani.

- i. Belum seluruhnya wilayah pedesaan terjangkau oleh petugas, karena tingkat transportasi yang relatif sulit dan mahal.
- j. Kurangnya sarana dan prasarana penyuluh, jikapun tersedia belum di manfaatkan secara optimal.

Upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan kebijakan yang mampu mengakses perubahan bagi kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam membangun mereka sendiri melalui peningkatan dibidang sektor pertanian. Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga yang terus menerus dari waktu ke waktu melalui : pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; pengembangan teknologi produksi pangan; pengembangan sarana prasarana produksi pangan; dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan telah digulirkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilakukan di desa rawan dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Sintang juga telah melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dimaksud. Adapun Lokasi Kecamatan Dan Jumlah Sasaran Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Sintang Th. 2006, 2007, 2008 Dan 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Lokasi Kecamatan Dan Jumlah Sasaran Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Sintang Th. 2006, 2007, 2008 Dan 2009

| NO     | KECAMATAN       | SASARAN JUMLAH DESA           |                    |                  |                   |
|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|        |                 | TH.<br>2006                   | TH.<br>2007        | TH.<br>2008      | TH.<br>2009       |
| 1      | Kayan Hilir     | Desa Pelaik<br>Desa Sei Buaya |                    |                  |                   |
| 2      | Serawai         |                               | Desa Nanga Serawai |                  |                   |
| 3      | Ambalau         |                               | Desa Nanga Ambalau |                  |                   |
| 4      | Ketungau Tengah |                               |                    | Desa Tirta Karya |                   |
| 5      | Kayan Hulu      |                               |                    |                  | Desa Nanga Tongoi |
| JUMLAH |                 | 2                             | 2                  | 1                | 1                 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui salah satu Desa di Kabupaten Sintang yang menjadi sasaran Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir. Penetapan Desa Pelaik sebagai sasaran Program Aksi Desa Mandiri Pangan diantaranya adalah berdasarkan presentase keluarga pertanian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Penduduk Kecamatan Kayan Hilir Menurut Persentase Keluarga Pertanian Tahun 2008

| No. | Desa          | Penduduk | Keluarga | % Keluarga Pertanian |
|-----|---------------|----------|----------|----------------------|
| 1.  | Natai Tebedak | 2.288    | 393      | 84                   |
| 2.  | Jambu         | 1.643    | 409      | 83                   |
| 3.  | Nanga Mau     | 3.880    | 821      | 79                   |
| 4.  | Mentunai      | 2.290    | 604      | 76                   |
| 5.  | Tuguk         | 1.189    | 307      | 77                   |
| 6.  | Nyangkom      | 1.371    | 322      | 78                   |
| 7.  | Nanga Tikan   | 1.431    | 349      | 73                   |
| 8.  | Kerapa Sepan  | 1.343    | 291      | 80                   |
| 9.  | Pelaik        | 1.020    | 172      | 83                   |
| 10. | Tertung Mau   | 1.863    | 503      | 78                   |
| 11. | Pakak         | 1.808    | 438      | 75                   |
| 12. | Melingkat     | 1.193    | 292      | 76                   |
| 13. | Sungai Buaya  | 2.865    | 702      | 75                   |

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2008.



Berdasarkan data pada tabel di atas, Penduduk Desa Pelaik Menurut Persentase Keluarga Pertanian Tahun 2008 cukup tinggi yaitu 83 %. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya Di Desa Pelaik dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.3. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya Di Desa Pelaik Tahun 2008

| No. | Jenis Pengairan          | Ditanami Padi | Tidak Ditanami Padi | Sementara Tidak Diusahakan |
|-----|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1.  | Irigasi Teknis           | -             | -                   | -                          |
| 2.  | Irigasi Setengah Teknis  | -             | -                   | -                          |
| 3.  | Irigasi Sederhana        | 87            | -                   | -                          |
| 4.  | Irigasi Desa / Non PU    | 65            | -                   | -                          |
| 5.  | Tadah Hujan              | 249           | -                   | 1.023                      |
| 6.  | Pasang Surut             | -             | -                   | -                          |
| 7.  | Lebak                    | 275           | -                   | -                          |
| 8.  | Polder dan Sawah Lainnya | -             | -                   | -                          |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2008.

Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairannya Di Desa Pelaik masih banyak yang belum diusahakan. Selanjutnya, luas lahan kering menurut jenisnya di Desa Pelaik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Luas Lahan Kering Menurut Jenisnya Di Desa Pelaik Tahun 2008

| No. | Jenis Lahan Kering           | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----|------------------------------|------|------|------|
| 1.  | Pekarangan                   | 34   | 27   | 27   |
| 2.  | Tegal / Kebun                | 63   | 67   | 67   |
| 3.  | Ladang / Huma                | 31   | 66   | 120  |
| 4.  | Pengembalaan / Padang Rumput | -    | -    | -    |
| 5.  | Sementara Tidak Diusahakan   | 547  | 463  | 91   |
| 6.  | Hutan Rakyat                 | 300  | 225  | 225  |
| 7.  | Hutan Negara                 | 980  | 980  | 817  |
| 8.  | Perkebunan                   | 525  | 916  | 916  |
| 9.  | Lain-lain                    | 930  | 112  | 142  |
| 10. | Rawa (Yang Tidak Ditanami)   | 231  | 231  | 231  |
| 11. | Tambak                       | -    | -    | -    |
| 12. | Kolam / Tebat / Empang       | -    | -    | -    |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2008.

Lahan kering menurut jenisnya di Desa Pelaik cukup banyak. Hanya saja, dalam melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan tersebut masih menghadapi permasalahan antara lain: Terbatasnya dan lemahnya sumber daya manusia; Rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten ke desa sasaran dan dengan kondisi geografi, Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih terbatas, Lemah dan terbatasnya kelembagaan yang ada di desa; Lemahnya akses Teknologi, Lemahnya modal yang di miliki kelompok serta Minimnya dana untuk menunjang kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Perkembangan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5. Perkembangan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik

| Kelompok Tani       |       |         |                         | Pemanfaatan Dana injasras                           | Pinjaman yg Sdh Dikembalikan | Pinjaman yg sdh digulirkan | Pencorima Pergalima dan berikutnya | Ket                                       |
|---------------------|-------|---------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| Nama Kelompok       | Ketua | Jml Agt | Dana PMUK yang diterima |   |                              |                            |                                    |   |
| Pelaik Mandiri Jaya | Lewis | 50      | 60.000.000              | pengembangan usaha kelompok dibidang perikanan ayam | 5.000.000                    | 0                          | Kelompok baru                      | PMUK TA 2006 dicairkan pd bulan jani 2007 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Data pada tabel di atas menunjukkan, Perkembangan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik masih belum optimal. Dari Rp 50.000 yang diberikan pinjaman yang dikembalikan baru Rp 5.000.000, bahkan pinjaman yang digulirkan sama sekali belum ada. Hal ini tentunya menunjukkan masih adanya masalah dalam implementasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang?. Dari rumusan masalah tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pembangunan pertanian

2. Secara praktis penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan dapat dicari alternatif pemecahan masalahnya secara lebih lengkap dan menyeluruh. Selain itu, hasil penelitian merupakan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan pertanian di Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang penulis lakukan ini dapat dikatakan baru dilaksanakan.

Menurut Nugroho, (2003:34) dasar kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu “kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi”. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama antara legislatif dengan eksekutif adalah Undang-Undang di tingkat nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Secara khusus, di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat darurat, maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang bersifat sementara sampai Undang-Undang dibuat. Bahkan, di Indonesia, yang mengesahkan

Undang-Undang adalah Presiden. Undang-Undang sendiri disahkan setelah ada persetujuan legislatif dan eksekutif (Presiden).

Menurut Nugroho ( 2003:159) kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau peraturan pelaksanaan, sedangkan kebijakan publik yang langsung operasional antara lain adalah Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala daerah, Keputusan Kepala Dinas. Kemudian Nugroho (2003: 160) menyatakan pula bahwa dalam manajemen sektor publik, kebijakan publik dari tahap formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah yang dimulai dari : Misi, Visi, Rencana, Strategi, Program, Proyek, Kegiatan dan Umpan balik. Dengan demikian semakin jelas bahwa implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing, leading, controlling*. Kemudian secara rinci kegiatan manajemen implementasi kebijakan berutan dari tahapan : a) implementasi strategi , b) Pengorganisasian ,c) Penggerakan dan Kepemimpinan serta d) Pengendalian ( Nugroho, 2003: 163).

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang tentang kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), sudah semestinya kaidah proses kebijakan sebagaimana yang diungkapkan Nugroho tersebut. Selain itu, menurut Wibawa, Purbokusumo dan Pramusindo (1994: 3) kebijakan dibuat oleh pemerintah selalu menyentuh aspek sumber daya, perilaku dan pemaksaan.

Jika suatu kebijakan baru menyentuh aspek perilaku, maka pemerintah pasti akan merumuskan kebijakan guna mengatur pengalihan sumber daya maupun menyiapkan tata nilai yang memungkinkan pelaku yang diatur oleh kebijakan itu memenuhi kebijakan dan sebaliknya. Dalam hubungan ini maka kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) secara awal harus dapat menyentuh aspek perilaku para pelaku masyarakat petani yang akhirnya mereka mau mematuhi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

Guna mencapai tujuan kebijakan, Pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa Perhimpunan Sumber Daya dan Pengelola Sumber Daya tersebut. Menurut Willian N. Dunn sebagaimana dikutip Wibawa (1994: 4) bahwa hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut sebagai proses implementasi kebijakan dan di dalam proses kebijakan terdapat tidak saja perilaku administratif dan organisasional melainkan juga perilaku politis.

Berkenaan dengan penetapan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Kabupaten Sintang dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut tidak terlepas dari sumber daya, tata nilai dan perilaku dari anggota masyarakat yang diatur oleh kebijakan. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat petani adalah mencari kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi



keputusan tersebut (Heenz dikutip oleh Jones, 1994: 47). Dalam hal ini oleh Jones (1991: 51) dikatakan bahwa kegiatan legitimitasi menyangkut pertanyaan siapa yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas dipertahankan?, sedangkan yang menyangkut kegiatan implementasi menyangkut pertanyaan siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang didapatkan?.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsire (dikutip Wahab, 1997: 61) dinamakan sebagai *implementasi gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan/direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Besar kecilnya perbedaan prestasi hasil pelaksanaan dengan yang direncanakan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Walter Williams yang dikutip oleh Wahab (1997: 61) disebut sebagai *implementasi capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi ini tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada

jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Kemudian menurut George S Blair yang dikutip oleh Soenarko (2000: 166):

“ Kebijakan publik amat tergantung pada tujuh faktor utama, yaitu 1) berkaitan dengan kondisi demografis yang meliputi jenis penduduk, usia, pekerjaan dan komposisinya; 2) kondisi geografis yaitu menyangkut struktur alam dan lingkungan dimana masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau tinggal; 3) nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat-masyarakat setempat; 4) konfigurasi politik lokal yaitu pertimbangan atas keberadaan kelompok-kelompok formal maupun non formal yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik; 5) sumber daya ekonomi yaitu adanya resources yang mendukung pendanaan atas diberlakukannya sebuah kebijakan; 6) kepentingan elit yang menyangkut bukan saja elit nasional tetapi elit lokal sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan elit lokal, akan dengan cepat tertolak, karena dalam setiap kelompok masyarakat terdapat kepatuhan sekelompok masyarakat terhadap elit lokal; 7) rekrutmen, menyangkut rekrutmen elit termasuk aparat pemerintah daerah, aparat birokrasi, utamanya menyangkut mekanisme rekrutmen yang dapat dipertanggung jawabkan“.

Dengan demikian Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) hanya akan berhasil jika ke tujuh faktor tersebut diatas turut dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sementara itu Anderson (1979: 114) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota masyarakat yang cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan *ukuran* kebijakan yang mungkin bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatutan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok –kelompok tertentu dalam masyarakat.

Soenarko (2000: 185) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain :

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu dapat tidak tepat karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut; 2) sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; 3) sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; 4) isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar; 5) ketidakpastian faktor inter dan atau faktor ekster; 6) kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang; 7) dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis; 8) adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentuk kebijakan yang kurang sempurna dalam arti pada saat proses formulasi atau perumusan kebijakan (*policy formulation*) kurang memperhatikan faktor-faktor sebagaimana mestinya yang telah dikemukakan di atas. Hal lain adalah peran penting yang dimainkan oleh pelaksana

kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan *reformulation* sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan juga akan dikemukakan pendukung pelaksanaan suatu kebijakan, Anderson (1979: 114) mengemukakan : 1) respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau keputusan; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat sah oleh pejabat melalui prosedur yang telah ditetapkan; 4) sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam mengimplementasi kannya.

Menurut Soenarko (2000: 186) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu : 1) persetujuan, dukungan dan kepercayaan; 2) isi dan tujuan kebijakan yang dimengerti; 3) pelaksanaan yang cukup informasi mengenai kelompok sasaran; 4) pembagian yang efektif dalam pelaksanaan; 5) pembagian wewenang dan; 6) pemberian tugas yang memadai dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat Anderson dan Soenarko tersebut diatas, dihubungkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), maka faktor dukungan dan faktor penghambat keberhasilan kebijakan penanganan implementasi tentang Program Aksi Desa Mandiri

Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) mutlak harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang agar kebijakan yang akan diterapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sementara itu Islamy (1997: 107) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara. Jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuai dengan keinginan Pemerintah / Negara itu maka kebijakan Pemerintah tentang Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) tidak akan menjadi efektif.

Dalam mengkaji kemungkinan kebijakan dapat berubah, Parson (1997: 569) menyatakan dua pendekatan itu perubahan dalam ruang lingkup kebijakan yang menyangkut bagaimana perubahan dalam tujuan kebijakan, nilai, kepercayaan dan prioritas itu terjadi serta perubahan dalam ruang lingkup organisasinya yang menyangkut bagaimana kaitan antara nilai, kepercayaan, tujuan diatas dengan konteks organisasi pengambilan kebijakan itu.

Perubahan kebijakan dan pembuatan kebijakan akan dijelaskan dari berbagai hasil yang timbul serta kompetisi diantara keduanya. Demikian juga dalam melakukan peninjauan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha

Kelompok (PMUK) hendaklah didasarkan atas respek anggota masyarakat. Dengan model ini melakukan penilaian terhadap berbagai peristiwa dan menawarkan forum yang menengahkan masalah kebijakan yang tujuannya menyelesaikan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi pada nilai-nilai penting dari struktur yang ada, sehingga kompromi yang terjadi antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai pembuatan kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan melahirkan hasil akhirnya adalah sebuah implementasi kebijakan yang lahir dari adanya konsensus bersama.

Ketidak berhasilan pembangunan yang saling keterkaitan antara lapangan kerja primer yang satu dengan yang lainnya tidak dapat membangun sector pertanian khususnya yang berdomisili di desa, sehingga melahirkan kemiskinan di pedesaan. Sementara itu menurut Penny (Dillon dan Hermanto,1993:17) Kemiskinan sering dikaitkan pula dengan masalah kelaparan, karena diketahui kelaparan berkorelasi terhadap ketersediaan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak mampunya pemerintah dan swasta untuk menyediakan bahan pangan, walaupun ada dengan harga yang tinggi dan tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Antara kemiskinan, kelaparan dan daya beli merupakan lingkaran setan (*satanic cycle*) yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, upaya untuk memutuskan mata rantainya melalui pemenuhan terhadap kesedian pangan melalui kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) untuk

memberikan dukungan bagi terciptanya ketahanan pangan terutama pada masyarakat desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam konsep awal dari Penguatan Modal Usaha Kelompok terdiri atas tiga komponen, yakni pembedayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan sistem ketahanan pangan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat (2006:12) dapat dioperasionalisasi dengan berbagai bentuk :

- Pemberdayaan sebagai partisipasi, Pemberdayaan diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai pelaksanaan program pembangunan maupun dalam proses pengambilan keputusan.
- Pemberdayaan sebagai demokratisasi. Beberapa pihak melihat pemberdayaan lebih sebagai upaya pengembangan demokrasi yang berarti masyarakat harus lebih berperan di dalam proses politik.
- Pemberdayaan sebagai pengembangan kapasitas. Masyarakat atau individu dianggap berdaya apabila terjadi peningkatan kapasitas pada dirinya.
- Pemberdayaan sebagai perbaikan ekonomi. Asumsinya apabila ekonomi masyarakat berkembang berbagai aspek yang lain akan dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat.
- Pemberdayaan sebagai pengembangan individu. Sebagian kalangan meyakini bahwa pemberdayaan harus dimulai dari pengembangan kesadaran kritis dari individu dan memungkinkan individu untuk mengambil sikap berdasarkan kesadaran sendiri.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan menggunakan Sistem Ketahanan Pangan terdiri atas sub-sistem ketersediaan, sub-sistem distribusi dan sub-sistem konsumsi, karena itu melalui kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) untuk membangun sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 menetapkan bahwa



Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketahanan pangan yang diwujudkan melalui kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dianggap sebagai alternatif dalam memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat desa dan sekaligus penyediaan pangan di desa sebagai sumber penghasil pangan.

Untuk mewujudkan harapan bagi tersedianya pangan dan perbaikan ekonomi masyarakat desa harus dibangun melalui perubahan sikap mental masyarakat desa untuk membangun dirinya sendiri. Tidak mungkin dapat dilaksanakan bilamana masyarakat desa belum siap menghadapi perubahan melalui berbagai inovasi atau penemuan baru merupakan salah satu sumber penting yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan. Inovasi dibedakan ke dalam 2 macam yaitu inovasi primer dan inovasi sekunder. Inovasi primer adalah penemuan akan sesuatu hal yang baru baik peralatan, prinsip-prinsip, maupun kegiatan-kegiatan yang secara luas diterima oleh sekelompok masyarakat. Inovasi sekunder adalah suatu bentuk penemuan baru yang muncul sebagai hasil dari adanya sebuah atau serangkaian penerapan inovasi primer. Inovasi sendiri diartikan sebagai sebuah istilah untuk menunjukkan bahwa suatu penemuan baru telah diterima dan diterapkan atau digunakan oleh sebagian besar warga suatu masyarakat (Agusyanto,2006:7.7). Inovasi atau penemuan baru merupakan sarana bagi perubahan masyarakat



dalam menghadapi berbagai kebijakan yang bersifat eksternal dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dalam menyiapkan ketahanan pangan dengan kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Upaya ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam pembangunan di sektor pertanian, yang mana kedudukan masyarakat sebagai *stakeholders* pembangunan pertanian.

Kalau dibandingkan dengan kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan bantuan program Pengembangan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDMDKE) dengan mekanismenya penyalurannya sangat berbeda. Sementara itu, mekanisme bantuan Program Pengembangan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDMDKE) diberikan dalam tiga cara :

1. bantuan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai bantuan langsung (*specific block grant*);
2. bantuan bersifat hibah bergulir (*revolving fund*) yang digunakan untuk investasi ekonomi yang menghasilkan dana bergulir,
3. kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat (*capacity building investment*).

Konsep yang dibangun dari kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok adalah bagaimana masyarakat dapat menggunakan sumber daya local dengan potensi yang dimilikinya, kemudian merencanakan dan membuat berbagai bentuk kegiatan melalui kelompok untuk menciptakan tersedianya

pangan. Secara umum memiliki konsep yang berbeda dengan bantuan program Pengembangan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDMDKE). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari konsepsi yang ada dan operasionalisasi ditingkat masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan sistem ketahanan pangan menjadi ciri tersendiri dari kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok. Menurut Koentjaraningrat (1979:154) suatu kelompok atau group juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya, dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat-istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Namun, disamping ketiga ciri tadi, suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok juga mempunyai ciri tambahan, yaitu organisasi dan sistem pimpinan, dan selalu tampak sebagai kesatuan dari individu-individu pada masa-masa yang secara berulang berkumpul dan yang kemudian bubar lagi.

Dari konsepsi kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok dapat disimpulkan, bahwa kemampuan masyarakat agar dapat berdaya secara ekonomi dalam meningkatkan hidupnya, dengan membangun dirinya sendiri dalam suatu kelembagaan untuk menyediakan pangan bagi rumah tangganya, lingkungannya dan masyarakat yang berada disekitarnya. Kebijakan penguatan modal usaha kelompok tani dapat dilaksanakan secara efektif dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang sudah diimplementasikan.

Keberhasilan kebijakan harus dinilai tingkat keberhasilannya, sehingga menurut Suchman (Winarno, 2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kebijakan penguatan modal usaha kelompok yang diimplementasikan sesuai dengan perubahan lingkungan dan pencapaian tujuan untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat. Karena itu, keberadaan pendamping untuk mendukung implementasi kebijakan diperlukan bagi pencapaian target yang sudah ditentukan. Disamping pencapaian tujuan yang optimal diperlukan sosialisasi keterampilan dan pengetahuan bisa dilalui program manajemen pelatihan dan pengajaran, dilakoni oleh pra pelatih dan pengajar (Ndraha, 2003:81). Penentuan standarisasi kegiatan diperlukan melalui interminasi antara implementator melalui program pelatihan dan pengajaran untuk memenuhi tingkat harapan yang ingin dicapai, walaupun terjadi deviasi dari implementasi dari kebijakan. Disamping faktor teknis dalam pengembangan penguatan modal usaha kelompok yang perlu mendapat perhatian adalah bidang organisasi, hal ini disebabkan bantuan penguatan modal diarahkan pada bantuan kelompok yang merupakan bentuk lain dari organisasi. Menurut Gibson (1985:25) bidang perilaku organisasi

mengidentifikasi tiga tingkat analisis; (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ternyata peran individu, kelompok, dan organisasi menjadi masalah yang penting untuk mencapai tujuan maksimal dari keberhasilan kebijakan penguatan modal usaha kelompok tersebut tidak hanya menyangkut masalah teknis tetapi masalah organisasi, karena menyangkut kebijakan yang diimplementasikan.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan umumnya serta implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) tahun khususnya adalah tanggapan target group/masyarakat. Tanggapan atau respon masyarakat ini akan sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

Menurut Allport (dalam Sastropetro, 1988:12 ) menjelaskan batasan tentang partisipasi adalah sebagai berikut: “bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja.” Dalam hal ini keterlibatan diri yang dimaksudkan adalah menyangkut keterlibatan dalam pikiran dan perasaan.

Sementara menurut Davis (dalam Sastropetro, 1988:13) memberikan definisi mengenai partisipasi sebagai berikut:

*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. (Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan)*

Selanjutnya, menurut Gie (1981:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai:

“Suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi”. Dari pengertian partisipasi ini menunjukkan adanya aktivitas seseorang untuk ikut ambil bagian didalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut menurut David (dalam Sastropetro 1986:13) menyatakan sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”

Berdasarkan pengertian diatas, didalam pengertian partisipasi paling tidak terdapat tiga unsur penting memerlukan perhatian khusus, yaitu:

1. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Lebih dari semata-mata keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk membantu kelompok.



3. Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Kemudian Ndraha (1987:42), menjelaskan tentang definisi tersebut diatas, bahwa:

“Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam mempertanggung jawabanya.”

Terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian partisipasi tersebut yang antara lain, keterlibatan mental, emosi dan dengan sendirinya fisik, kehendak sendiri atau prakasa (inisiatif) untuk mengambil bagian didalam usaha mencapai tujuan, memberikan swadaya serta adanya rasa tanggung jawab. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Partisipasi masyarakat bukanlah sekedar pelengkap, tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Bahkan Du-Sautoy (dalam Ndraha 1987:103) mengatakan bahwa, “partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan.”

Memperhatikan demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka tidaklah mengherankan bahwa di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Bappenas R, 2004:69), telah ditegaskan sebagai berikut, "dilain pihak partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau didalam menerima kembali hasil-hasil pembangunan".

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 tersebut, terlihatlah gambaran ruang lingkup partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dimana partisipasi diharapkan meliputi tiga hal yaitu :

1. Dalam memikul beban pembangunan.
2. Dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pembangunan.
3. Dalam menerima hasil-hasil pembangunan.

Menurut Ndraha (2007:2), ketiga hal tersebut diatas dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam memikul beban pembangunan :
  - a. beban fisik : biaya, tenaga, waktu, kehadiran, material, tanah, alat perlengkapan, sarana penunjang yang memerlukan swadaya.
  - b. Beban non fisik : tanggapan, pendapat, sarana, pikiran, prakarsa.
2. Partisipasi dalam tanggung jawab pelaksanaan pembangunan:
  - a. Pertanggung jawaban administrasi.
  - b. Kontrol Sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi dalam menerima kembali hasil - hasil pembangunan:
  - a. Penilaian sosial terhadap hasil (manfaat) pembangunan.
  - b. Penggunaan dan pengusahaan hasil pembangunan.
  - c. Perawatan/pemeliharaan hasil pembangunan.
  - d. Pengembangan hasil pembangunan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam memikul beban penyelenggaraan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) seperti biaya, tenaga, waktu, kehadiran, material, tanah alat perlengkapan, serta sarana penunjang yang memerlukan swadaya. Dapat juga partisipasi dalam aspek non-fisik seperti tanggapan, pendapat, sarana, pikiran, prakarsa.
2. Partisipasi dalam tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) seperti pertanggung jawaban administrasi serta kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
3. Partisipasi dalam menerima kembali hasil - hasil penyelenggaraan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) seperti, penilaian sosial terhadap hasil (manfaat) kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), penggunaan dan pengusaha hasil penyelenggaraan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK); Perawatan/pemeliharaan hasil penyelenggaraan kebijakan

Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) serta pengembangan hasil penyelenggaraan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

Untuk melaksanakan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di pedesaan perlu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) diperlukan keikutsertaan dari seluruh lapisan masyarakat.

Agar partisipasi masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka diperlukan suatu wadah yang disebut dengan wadah partisipasi. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986:360) wadah dari partisipasi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: "Wadah partisipasi merupakan semacam lembaga sebagai bentuk dan cara untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam suatu jenis partisipasi."

Selanjutnya Pasaribu dan Simanjuntak (1986:349) menjelaskan mengenai arti dan jenis-jenis partisipasi yang terdapat dalam suatu masyarakat adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan jenis partisipasi yaitu macamnya sumbangan yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Untuk sementara, sumbangan dalam partisipasi dapat diperinci menurut jenis sebagai berikut :

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan Desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda panguyuban, misalnya arisan,, koperasi, layat (dalam peristiwa kematian), kondang (dalam peristiwa pernikahan) Nyambung, mulang sambung.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bukan hanya dalam bentuk fisik saja, misalnya biaya, tenaga, material dan lain-lain, tetapi juga dalam bentuk non fisik seperti tanggapan, pendapat, saran pikiran dan prakarsa. Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, Satropoetro (1988:26-27) mengemukakan beberapa jenis partisipasi, yakni sebagai berikut, “(1) Pikiran (*psychological participation*); (2) Tenaga (*physical participation*); (3) Pikiran dan Tenaga (*psychological and physical participation*); (4) Keahlian (*participation with skill*); (5) Barang (*material participation*); dan (6)Uang (*money participation*)”.

Seperti yang telah tercantum dalam kutipan di atas menunjukkan jenis partisipasi yang diharapkan dalam implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yaitu : partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial.



Kesemuanya ini dapat dilaksanakan apabila masyarakat yang tinggal di Desa tersebut sudah dapat mencukupi segala kebutuhannya terutama kebutuhan rumah tangga. Terpenuhnya suatu kebutuhan rumah tangga masyarakat sangatlah ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat.

Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk mencurahkan perhatiannya terhadap segala pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa. Dan sebaliknya apabila masyarakat yang memiliki pendapatan yang kecil dimana setiap hari harus selalu memikirkan untuk bagaimana caranya dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga perhatian yang dapat dicurukannya terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa dimana ia bertempat tinggal menjadi berkurang, bukan berarti bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tetapi karena adanya suatu keterbatasan yang ada pada mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, bukan hanya bersifat parsial saja, artinya partisipasi hanya dilaksanakan pada satu atau beberapa proses saja. Tetapi yang diharapkan adalah partisipasi yang bersifat profesional, yakni partisipasi sepanjang proses pembangunan.

Adapun mengenai bentuk partisipasi profesional dalam pembangunan, Ndraha (1987:103-104) mensitir beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiatkan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan dikalangan masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan yang lebih spesifik dan kondisional, seperti masyarakat desa, masyarakat petani, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat yang demikian itu memiliki nilai yang lebih pragmatis, karena selain dapat memberikan keterangan, masukan dan data yang berguna, juga dapat memperbaiki program dan rencana-rencana yang sudah ada.

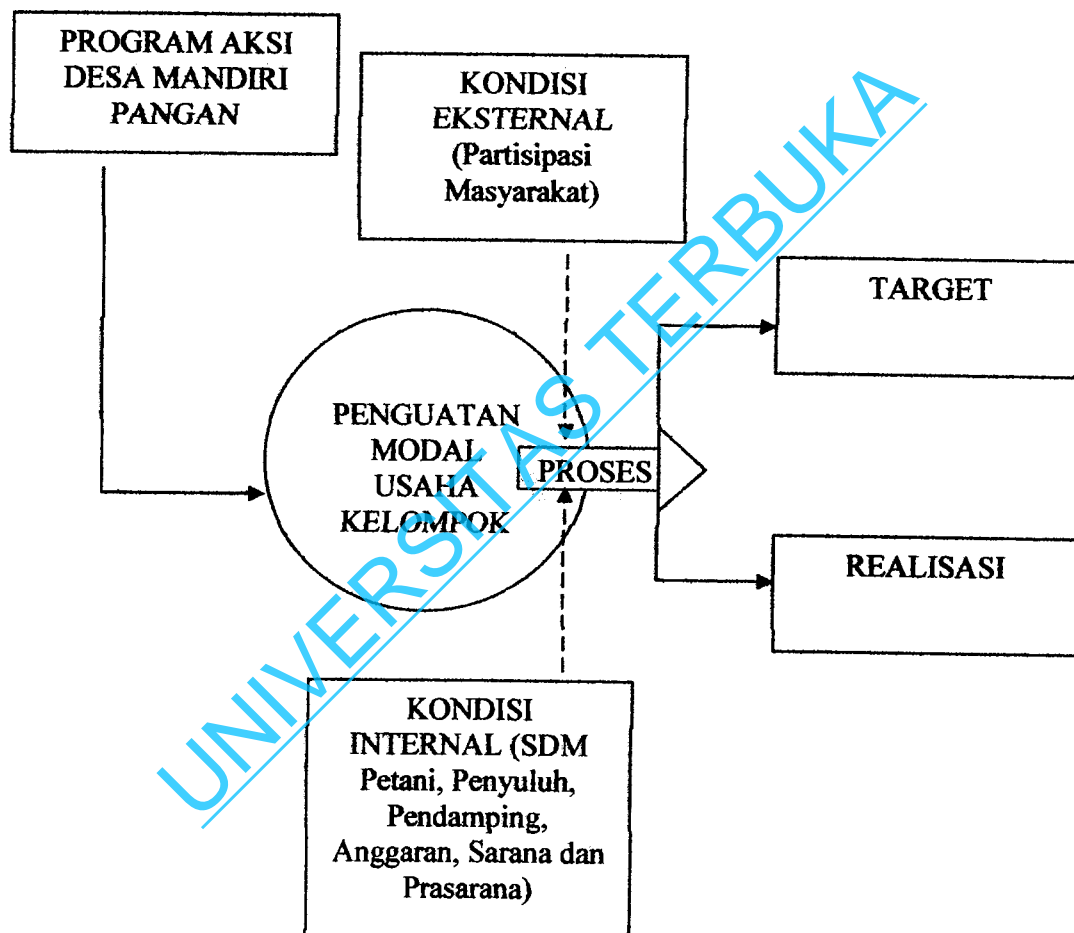
Selanjutnya Sastropetro (1988:21) menjelaskan bidang-bidang partisipasi masyarakat adalah: “a). Dalam proses pengambilan keputusan dan/atau proses perencanaan; b). Dalam proses pelaksanaan program; c). Dalam proses monitoring dan evaluasi program.” Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa untuk berpartisipasi dalam Program Aksi Desa

Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masyarakat dilibatkan untuk ikut serta berpartisipasi melalui program tersebut. Ini sangatlah memungkinkan karena sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui program Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

Ada sepuluh alasan melakukan pengembangan perdesaan, yaitu: (1). masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan sumberdaya lahan, sehingga tidak berusaha di sektor pertanian; (2). masih adanya kemiskinan struktural, sehingga meskipun telah berusaha tetapi pendapatan yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan keluarga; (3). minimnya sarana dan prasarana (pengairan, jalan desa, sarana usahatani, air bersih, listrik dan pasar); (4). terbatasnya pengetahuan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; (5). belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat/kelompok; (6). Terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga permodalan; (7). Rendahnya akses terhadap lembaga pemasaran; (8).terbatasnya akses informasi dan teknologi; (9). rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; dan (10). terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya kerawanan pangan dan kemiskinan di perdesaan.

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berkaitan dengan pola hubungan antara kebijakan bantuan Pengutan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dalam menciptakan ketahanan pangan yang penulis digambarkan dalam bentuk pola hubungan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar di atas, optimalisasi penerapan kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir dilingkupi oleh kondisi yang bersifat internal maupun eksternal.

Kondisi eksternal (kondisi yang berada di luar program) berhubungan dengan partisipasi masyarakat, sedangkan kondisi internal berkaitan dengan SDM Petani, Penyuluh, Pendamping, Anggaran, Sarana dan Prasarana. Kebijakan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) meliputi : (1) membuka akses, (2) meningkatkan potensi dan kapasitas SDM, (3) membangun wilayah secara terpadu, dan (4) meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam Penentuan kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat yang kemudian modal tersebut dimanfaatkan sesuai dengan potensi masyarakat desa dengan harapan tersedianya bahan pangan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk membangun usaha ketahanan pangan dilakukan secara berkelompok dalam mengelola modal (uang tunai). Dengan kebijakan tersebut dapat membawa pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa melalui ketersediaan pangan.

### **C. Definisi Konsep Dan Operasional**

Definisi memberikan penjelasan terhadap variabel yang akan diteliti, sehingga menggunakan indikator sebagai objek yang akan diteliti, dan arena itu definisi terpilih inilah yang disebut sebagai definisi operasional (Winarno,2007:8.12) dalam penelitian ini disebut sebagai pengertian variabel yang akan diteliti adalah Kebijakan Bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dalam menciptakan ketahanan pangan di Desa Pelaiik



Kecamatan Kayan Hilir, dengan operasional variabel atau definisi variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. *Kebijakan* adalah keputusan (*decision*) yang sudah ditetapkan atau diputuskan, sehingga dapat mempengaruhi orang lain (individu atau publik) dilakukan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*).
2. *Pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau Minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman
3. *Desa atau yang disebut dalam (UU No. 32/2004)* diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Mandiri Pangan* diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
5. *Desa Mandiri Pangan* adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem

konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

6. *Kelompok afinitas (PIDRA)* adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama.
7. *Pemberdayaan Masyarakat* adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan sesuai dengan lingkungan social ekonomi kehidupan mereka sendiri.
8. *Ketahanan Pangan (UU NO.7/1996)* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. *Ketahanan Pangan Masyarakat (Community food Security Coalition/CFSC)* adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat (rumah tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima secara kultural, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial.
10. *Desa Rawan Pangan* adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan

rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.

11. *Kemandirian Pangan* secara Makro/Nasional : Kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman berdasarkan optimalisasi pemanfaatan SDM, SDA dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Mikro/Rumah Tangga (RT): Kemampuan RT memenuhi kebutuhan pangannya, dengan jumlah, mutu, keragaman, gizi, aman, dan halal; baik dari hasil produksi sendiri ataupun membeli dari pasar. Kemandirian pangan desa dibentuk oleh kemandirian pangan rumahtangga, kemandirian pangan wilayah dibentuk oleh kemandirian pangan desa, dan kemandirian pangan nasional dibentuk oleh kemandirian pangan wilayah.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Dilihat dari substansinya, penelitian ini pada dasarnya adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Azwar (1998:7), penelitian deskriptif adalah “suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta”. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai sasaran atau mengenai bidang tertentu, serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), maka sesuai dengan pendapat Arikunto (1993:292) yang menyatakan bahwa “penelitian evaluasi merupakan model penelitian yang digunakan untuk menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai positif suatu program, yang telah dikembangkan, dengan demikian kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan”. Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa penelitian ini pada dasarnya lebih banyak mengarah kepada efektifitas sebuah

program yang telah ditetapkan pemerintah yang kemudian hasilnya menjadi pertimbangan untuk pembuatan keputusan perbaikan di masa depan.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada dasarnya sebuah fenomena yang batas-batas tertentu dapat dipahami sebagai sebuah program pemerintah karena didalamnya terdapat misi dan tujuan yang hendak dicapai yang memiliki dimensi sosial cukup besar. Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan evaluasi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) tersebut agar diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis, yang dari itu akan bisa diambil sikap baik perencanaan kembali atau pengambilan keputusan yang bersifat perbaikan di masa mendatang.

#### **B. Subjek Penelitian**

Menurut Nasution (1998:23), “dalam penelitian kualitatif yang menjadi subjek penelitian hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian”. Berdasarkan uraian di tersebut, subjek penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Pelaik Mandiri Jaya yang ditetapkan sebagai penerima bantuan PMUK di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 50 orang. Selanjutnya, karena Program Aksi Desa Mandiri Pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu ditetapkan informan sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang

3. Ketua Pokja Desa Mapan Kabupaten Sintang
4. Camat Kayan Hilir
5. Kepala Desa Pelaik

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara mendalam/interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian. Menurut Arikunto (1993:243) “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara”.
2. Teknik observasi. Menurut Furhan, (1992:136) “observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, saat melakukan penelitian”. Teknik observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
3. Kuesioner, digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan langsung dari responden, yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anggota Kelompok Tani sebanyak 50 orang. Variabel yang hendak dijangkau melalui kuesioner ini adalah pendapat, sikap dan tanggapan responden



terhadap proses, pencapaian tujuan, partisipasi masyarakat, serta kualifikasi dan peran pendamping dalam Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Pelai.

#### **D. Alat Pengumpul Data**

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Panduan Wawancara. Berupa susunan pertanyaan yang langsung dinyatakan kepada *informan* maupun responden, yakni dalam bentuk pertanyaan terbuka yang di cantumkan dalam media, hal ini menjadi pedoman peneliti dalam melakukan wawancara mendalam.
2. Pedoman observasi untuk menjaring informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Daftar ini untuk melengkapi sikap, tanggapan dan kesulitan- kesulitan *informan* dalam menanggapi atau memahami pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
3. Kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian yang ditujukan kepada anggota Kelompok Tani sebanyak 50 orang untuk dijawab secara tertulis pula

#### **E. Analisis Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu deskriptif, maka pengolahan dan analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Data yang telah

diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi).

#### **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Alasan pemilihan lokasi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Desa Pelaik merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sintang yang menjadi sasaran Program Aksi Desa Mandiri Pangan.
2. Adanya masalah yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Pelaik, antara lain: Terbatasnya dan lemahnya sumber daya manusia; Rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten ke desa sasaran dan dengan kondisi geografi, Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih terbatas, Lemah dan terbatasnya kelembagaan yang ada di desa; Lemahnya akses Teknologi, Lemahnya modal yang dimiliki kelompok serta Minimnya dana untuk menunjang kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kabupaten. Kecamatan ini terletak di wilayah Timur Kabupaten Sintang. Kecamatan Kayan Hilir secara geografi terletak diantara  $0^{\circ} 11^1$  Lintang Utara –  $0^{\circ} 14^1$  Lintang Selatan.  $111^{\circ} 36^1$  Bujur Timur –  $112^{\circ} 15^1$  Bujur Timur. Sedangkan batas-batas administrasi Kecamatan Kayan Hilir adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Silat Hilir dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai.

Luas wilayah masing-masing Desa di Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas wilayah masing-masing Desa di Kecamatan Kayan Hilir

| No.                   | Desa/Kelurahan<br><i>Village/ Wards</i> | Pusat kota<br><i>Capital</i> | Luas<br><i>Area</i><br>(Km <sup>2</sup> ) | Persentase terhadap<br>Kecamatan<br><i>total</i> | luas<br><i>Percentage to</i><br><i>area of District</i><br>(%) |
|-----------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| [1]                   | [2]                                     | [3]                          | [4]                                       | [5]  |  |
| 1.                    | Natai Tebedak                           | Natai Tebedak                | 85,00                                     | 7,48   |  |
| 2.                    | J a m b u                               | J a m b u                    | 98,00                                     | 8,62   |  |
| 3.                    | Nanga Mau                               | Nanga Mau                    | 125,50                                    | 11,04  |  |
| 4.                    | Mentunai                                | Mentunai                     | 108,00                                    | 9,50   |  |
| 5.                    | T u g u k                               | T u g u k                    | 87,00                                     | 7,65   |  |
| 6.                    | Nyangkom                                | Nyangkom                     | 89,00                                     | 7,83   |  |
| 7.                    | Nanga Tikan                             | Nanga Tikan                  | 68,00                                     | 5,98   |  |
| 8.                    | Kerapa Sepan                            | Kerapa Sepan                 | 74,00                                     | 6,51   |  |
| 9.                    | P e l a i k                             | P e l a i k                  | 64,00                                     | 5,63   |  |
| 10.                   | Tertung Mau                             | Tertung Mau                  | 120,00                                    | 10,56  |  |
| 11.                   | P a k a k                               | P a k a k                    | 53,20                                     | 4,68   |  |
| 12.                   | Melingkat                               | Melingkat                    | 61,00                                     | 5,37   |  |
| 13.                   | Sungai Buaya                            | Sungai Buaya                 | 104,00                                    | 9,15   |  |
| Kecamatan Kayan Hilir |   |                              | 1.136,70                                  | 100,00   |  |

Sumber: Kantor Camat Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir memiliki luas wilayah 1.136,70 Km<sup>2</sup> atau 5,25 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Di mana sekitar 98,51 persen atau sekitar 1.119,80 Km<sup>2</sup> merupakan lahan kering, sedangkan sisanya sekitar 16,90 Km<sup>2</sup> merupakan lahan sawah.

Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari 13 desa dengan 44 dusun, di mana sampai dengan tahun 2006 telah terjadi 10 kali pergantian camat. Dari 13 desa tersebut seluruhnya telah memiliki BPD ( Badan Perwakilan Desa ).

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat (Instansi Vertikal), BUMN serta BUMD yang bekerja di Kecamatan Kayan Hilir keadaan 31



Desember 2006 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 38 orang berjenis kelamin laki-laki dan pegawai perempuan sebanyak 5 orang.

Nama-Nama Camat Yang Pernah / Masih Menjabat Di Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Nama-Nama Camat Yang Pernah / Masih Menjabat Di Kecamatan Kayan Hilir

| No. | Nama-nama Camat<br><i>Names of District Head</i> | Periode | <i>Periods</i> |
|-----|--|---------|----------------|
| [1] | [2]  | [3]     |                |
| 1.  | Ade Djamain, BA                                  | 1972    | - 1975         |
| 2.  | Binsar Simanjuntak                               | 1975    | 1980           |
| 3.  | Djufri Djohari, BA                               | 1980    | 1983           |
| 4.  | Jannah lingga, BA                                | 1983    | 1988           |
| 5.  | Rajiman Abdullah, BA                             | 1988    | - 1990         |
| 6.  | Drs. Bruno Udin                                  | 1990    | - 1994         |
| 7.  | Fahlevie Alhani, S.Sos                           | 1994    | - 1998         |
| 8.  | M. Budin, S.Sos                                  | 1997    | - 2001         |
| 9.  | Drs. M. Tauran                                   | 2001    | - 2003         |
| 10. | Sudirman, S.Sos, M.Si                            | 2003    | - 2006         |
| 11. | Ulidal Multar, S.Sos                             | 2006    | - Sekarang     |

Sumber: Kantor Camat Kayan Hilir

Pada tahun 2008 penduduk Kecamatan Kayan Hilir mencapai 24.185 jiwa dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 105. Rasio tersebut yang nilainya lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> sekitar 21 jiwa dan kepadatan per dusun mencapai 550 jiwa.

Penduduk Kecamatan Kayan Hilir Menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut

Tabel 4.3. Penduduk Kecamatan Kayan Hilir Menurut Jenis Kelamin

| No. | Desa          | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| [1] | [2]           | [3]       | [4]       | [5]    |
| 1.  | Natai Tebedak | 1.130     | 1.158     | 2.288  |
| 2.  | J a m b u     | 818       | 825       | 1.643  |
| 3.  | Nanga Mau     | 1.960     | 1.920     | 3.880  |
| 4.  | Mentumai      | 1.190     | 1.100     | 2.290  |
| 5.  | T u g u k     | 624       | 565       | 1.189  |
| 6.  | Nyangkom      | 696       | 676       | 1.371  |
| 7.  | Nanga Tikan   | 726       | 706       | 1.431  |
| 8.  | Kerapa Sepan  | 707       | 636       | 1.343  |
| 9.  | P e l a i k   | 483       | 537       | 1.020  |
| 10. | Tertung Mau   | 920       | 944       | 1.863  |
| 11. | P a k a k     | 1.022     | 786       | 1.808  |
| 12. | Melingkat     | 616       | 576       | 1.193  |
| 13. | Sungai Buaya  | 1.476     | 1.389     | 2.865  |
|     | Jumlah        | 12.367    | 11.818    | 24.185 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang

### B. Gambaran Umum Desa Pelaik

Desa Pelaik merupakan salah satu Desa dari 13 Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kayan Hilir. Desa Pelaik terletak di ibukota Kecamatan Kayan Hilir dapat ditempuh melalui kendaraan darat baik roda dua maupun roda



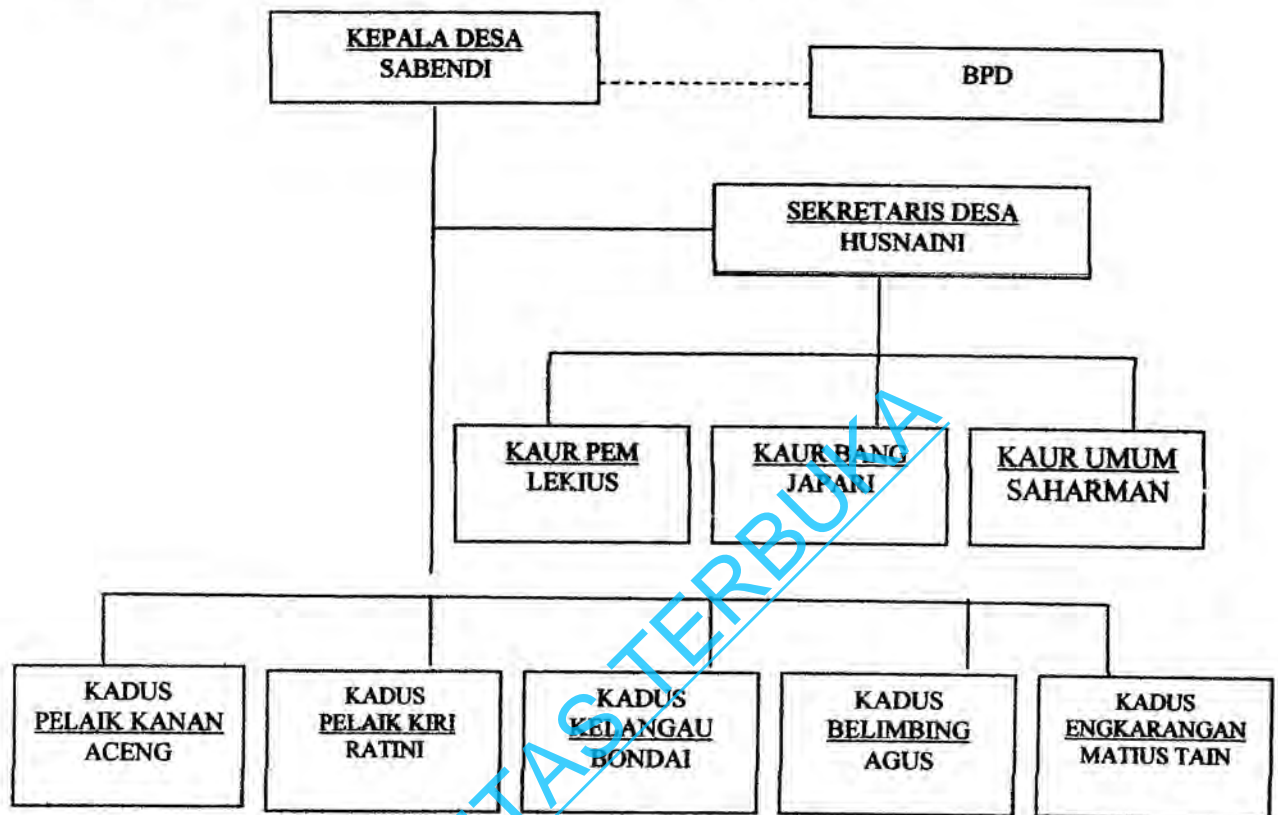
empat. Desa Pelaik secara administratif terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Pelaik dan Buluh Jegara. Dilihat dari luasnya, Desa Pelaik memiliki luas wilayah sebesar 64,00 kilometer persegi. Dari luas wilayah tersebut terdiri dari: 164 hektar untuk sawah dan ladang; kebun karet 636 hektar, pertanian lahan kering 106 hektar, hutan dan rawa 200 hektar; bangunan umum 2,5 hektar; pemukiman atau perumahan 279 hektar; pemakaman 1,50 hektar; perkantoran 1,2 hektar; perkebunan rakyat 390 hektar serta fasilitas umum seperti jalan dan gang seluas 2 hektar.

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Desa Pelaik sebanyak 1.020 jiwa yang terdiri dari 389 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut terdiri dari 483 jiwa laki-laki dan 537 jiwa perempuan. Mata pencaharian utama penduduk di Desa Pelaik sebagian besar adalah petani (63 %). Selain itu mata pencaharian sebagai karyawan atau buruh menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 20 %. Selebihnya (17 %) bekerja dibidang-bidang lain seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan sektor swasta lainnya.

Salah satu unsur yang cukup penting dalam masyarakat Desa Pelaik adalah struktur organisasi pemerintahan Desa. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yaitu untuk melihat kedudukan, tugas dan tanggung jawab para pemegang jabatan yang ada didalamnya.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Pelaik adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pelaik



Sumber : Kantor Desa Pelaik, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa, BPD merupakan salah satu unsur Pemerintahan Desa yang dipisahkan dari pengertian Pemerintah Desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh Masyarakat Desa setempat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaik telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pelaik adalah sebagai berikut:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Ketua       | : Lawas   |
| 2. Wakil Ketua | : Radimin Bakri   |
| 3. Sekretaris  | : Syamsul Bahri   |
| 4. Anggota     | : a. Syahdan<br>b. Bantot Banda<br>c. Aspawi<br>d. Pahas<br>e. R. Atot P<br>f. Petrus N |

### **C. Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang**

Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada hakekatnya PP tersebut secara operasional merupakan pemberdayaan masyarakat, untuk berperan aktif dalam mewujudkan aspek penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan



kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat perdesaan dengan fokus utamanya adalah rumah tangga perdesaan. Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu perdesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Desa merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di perdesaan adalah melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilakukan di desa rawan dengan

karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses untuk meningkatkan partisipasi, demokratisasi, pengembangan kapasitas, pengembangan ekonomi dan pengembangan individu. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di pedesaan. Penumbuhan kelembagaan di pedesaan meliputi : kelompok afinitas, Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa dengan didukung infrastruktur pedesaan diharapkan mampu mengembangkan sistem ketahanan pangan dengan melaksanakan subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan rumah tangga, berkembangnya usaha produktif dan berkembang pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman. Dengan demikian akan tercapai ketahanan pangan dan gizi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, perencanaan program aksi desa mandiri pangan dilakukan secara berjenjang di mulai dari perencanaan di tingkat kelompok masyarakat dan di tingkat desa. Dalam proses perencanaan tersebut didasarkan pada hasil pendataan kondisi awal (*base line*). Perencanaan ditingkat kelompok dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi oleh pendamping. Rencana yang disusun dikelompok mencakup penguatan kelompok dan pengembangan usaha kelompok, selanjutnya dituangkan kedalam Rencana



Kegiatan Kelompok (RKK). RKK menjadi bahan dalam penyusunan rencana ditingkat desa.

Perencanaan Desa dilakukan secara Partisipatif oleh Tim Pangan Desa, pendamping, dan tokoh masyarakat, diintegrasikan dengan program yang telah disusun di desa dalam Musrenbangdes. Perencanaan pembangunan desa merupakan rencana mewujudkan ketahanan pangan, mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Perencanaan dilakukan berdasarkan hasil base line survei dan PARA untuk mengetahui potensi dan permasalahan wilayah desa. Hasil perencanaan tingkat desa disampaikan dalam musrenbang kabupaten untuk diintegrasikan dengan program pembangunan lintas sektor. Bupati/walikota sebagai ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas lintas sektor dalam mendukung Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

Hasil perencanaan tingkat Kabupaten dapat diintegrasikan dengan program pembangunan lintas sektor tingkat Provinsi. Gubernur sebagai ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas lintas sektor dalam mendukung Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Hasil perencanaan tingkat Provinsi dapat diintegrasikan dengan program pembangunan lintas sektor. Menteri Pertanian sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas lintas sektor dalam mendukung Program Aksi Desa Mandiri Pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Perencanaan Program yang dilakukan oleh pusat dalam rangka pembangunan ketahanan pangan wilayah dan menurunkan angka kemiskinan di daerah rawan pangan. Sehingga jumlah lokasi pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan akan semakin bertambah baik didanai APBN maupun APBD.

Tahapan Persiapan diantaranya adalah Seleksi Lokasi Sasaran. Kriteria Desa yang menjadi lokasi adalah, Desa rawan pangan (minimal KK Miskin 30 persen dari penduduk desa) berdasarkan Survei DDRT. Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan. Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi dan kesediaan menerima program yang diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap Program Desa Mandiri Pangan.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Sintang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 141 Tahun 2006 Tanggal 5 Juli 2006, terpilih dua desa yaitu : Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir dan Desa Sungai Buaya Kecamatan Kayan Hilir yang sekarang sedang menjalani tahap Kemandirian. Selanjutnya di tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Nomor 232 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 dipilih kembali dua desa baru, yaitu desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai dan Desa Nanga Ambalau Kecamatan Ambalau yang pada tahun 2008 berada pada tahap Penumbuhan. Berdasarkan SK. Bupati Nomor 331 Tahun 2008 Tanggal 13 Juni 2008 telah ditetapkan pula Desa Tirta Karya Kecamatan Ketungau Tengah sebagai Desa mandiri Pangan.

Penetapan Lokasi Desa Mandiri pangan Di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Penetapan Lokasi Desa Mandiri pangan Di Kabupaten Sintang

| No | Kecamatan   | Penetapan Lokasi Desa Mandiri pangan   |
|----|-------------|--|
| 1. | Kayan Hilir | SK. Bupati Nomor 141 Tahun 2006 Tanggal 5 Juli 2006 Yaitu :<br>1. Desa Pelaik<br>2. Desa Sei Buaya |
| 2. | Serawai     | SK. Bupati Nomor 232 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Yaitu<br>1. Desa Nanga Serawai                |
| 3. | Ambalau     | SK. Bupati Nomor 232 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Yaitu<br>1. Desa Nanga Ambalau                |
| 4. | Ket.Tengah  | SK. Bupati Nomor 331 Tahun 2008 Tanggal 13 Juni 2008 Yaitu<br>1. Desa Tirta Karya                  |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Setelah ditetapkan lokasi, Kabupaten melakukan rekrutmen calon pendamping secara terbuka. Tenaga pendamping ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang pada bulan Februari-Maret. Syarat tenaga Pendamping adalah Pendidikan terakhir : minimal S1 (memiliki ijazah S1 jurusan pertanian, sosial, ekonomi), Memiliki pengalaman/kompetensi (memiliki surat pengalaman kerja) dalam pemberdayaan masyarakat dan atau pernah mengikuti pelatihan PRA (memiliki sertifikat) serta menguasai substansi ketahanan pangan, Diutamakan penduduk desa setempat (KTP), Bersedia tinggal di desa pelaksana Program Aksi Desa Mandiri Pangan (surat pernyataan) serta Memiliki komitmen,



profesionalitas, dan motivasi untuk menggerakkan pembangunan masyarakat desa.

Tabel 4.5. Proses Rekrutmen dan Penetapan Tenaga Pendamping Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kecamatan                | Proses Rekrutmen dan Penetapan Tenaga Pendamping   |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Kayan Hilir<br>(TA.2006) | Proses Rekrutmen sudah berjalan bulan Maret 2006 dengan SK Kepala Dinas Pertanian Kab. Sintang Nomor 61 Tahun 2006 Tanggal 16 Oktober Tahun 2006.<br>SK Bupati Nomor 301 Tahun 2007 Tanggal 5 Juli Tahun 2007. |
| 2. | Serawai (TA. 2007)       | Proses Rekrutmen sudah berjalan bulan Mei 2007 SK Bupati Nomor 307 Tahun 2007 Tanggal 12 Juli Tahun 2007.  |
| 3. | Ambalau (TA.2007)        | Proses Rekrutmen sudah berjalan bulan Mei 2007 SK Bupati Nomor 307 Tahun 2007 Tanggal 12 Juli Tahun 2007.  |
| 4. | Ket. Tengah (TA. 2008)   | Proses Rekrutmen sudah berjalan bulan mei 2008 SK Bupati Nomor 332 Tahun 2008 Tanggal 13 Juni 2008.  |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Tugas Pendamping pada tahap persiapan, adalah menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas. Mengembangkan dinamika kelompok (organisasi, administrasi, tabungan kelompok). Membina kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif. Menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok. Membuat database : pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, profil desa.

Tabel 4.6. Tugas Tenaga Pendamping Tahap Persiapan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kegiatan  | Waktu                          | Kegiatan  | Output   |
|----|---|--------------------------------|---|--|
| 1  | Identifikasi kondisi sarana dan prasarana, SDA, SDM, kelembagaan, permasalahan ketahanan pangan di wilayahnya           | 4 Minggu                       | Petugas pendamping bersama TPD dan aparat Kabupaten dan TPD melaksanakan Survei DDRT dan SRT, potensi desa                    | Output berupa Tersedianya data KK miskin, data potensi desa belum lengkap  |
| 2  | Sosialisasi Program   | 4 Minggu                       | Materi: Proksi Mapan, pendampingan, pemberdayaan masyarakat, menggerakkan tabungan kelompok                                   | Output berupa pemahaman Proksi Mapan, pelaksanaan pendampingan kepada kelompok afinitas belum optimal  |
| 3  | Memfasilitasi pembentukan kelompok KK miskin menjadi kelompok afinitas  | 3 Minggu                       | Pembentukan kelompok afinitas secara partisipatif   | Terbentuknya kelompok afinitas   |
| 4  | Memfasilitasi dalam menumbuhkan organisasi (pengurus kelompok)  | 2 Minggu                       | Semua KK miskin menjadi anggota kelompok afinitas   | Terbentuknya organisasi dan kepengurusan kelompok afinitas   |
| 5  | Mendampingi kelompok dalam memantapkan organisasi.  | 8 Minggu                       | Pendampingan secara intensif terhadap kelompok afinitas   | Output berupa Kemimpinan dan komunikasi Penyusunan AD/ART organisasi Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan pengembangan SDM RT belum optimal |
| 6  | Memfasilitasi kelompok membuat rencana kerja kelompok afinitas (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, tepat waktu) | 4 Minggu                       | Secara Partisipatif, Kegiatan kelompok : dapat berupa on farm, off farm, non farm. Penyusunan rencana usaha dengan metode PRA | Output berupa Rencana Kegiatan Kelompok - Rencana Usaha Kelompok belum ada   |
| 7  | Memfasilitasi kelompok dalam pencairan dana bantuan sosial (bansos)   | 4 Minggu                       | Surat perjanjian, buku tabungan kelompok, lampiran RUK  | Output berupa Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana bansos belum dilengkapi oleh kelompok.   |
| 8  | Memantau pencairan dana untuk kelompok afinitas   | 1 Minggu                       | Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana bansos telah diterima Satker.   | Dana bansos dari KPKN masuk ke rekening kelompok   |
| 9  | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kelompok   | Sepanjang Pelaksanaan Kegiatan | Melaporkannya ke Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten   | Output berupa Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan kinerja kelompok belum ada   |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Pendampingan dimulai pada tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian desa. Setelah tahap kemandirian desa pendamping sudah tidak dibiayai lagi, dan keberlanjutan kegiatan pendamping dilakukan oleh Tim Pangan Desa beserta kader-kader pangan desa. Kinerja



pendamping dievaluasi langsung didesa setiap bulan oleh kabupaten/kota berdasarkan rencana kerja yang dibuat pendamping. Evaluasi tahunan kinerja pendamping dilaksanakan pada bulan Desember. Ruang lingkup evaluasi kinerja pendamping tahap persiapan meliputi : realisasi program kerja pendampingan dan dinamika kelompok afinitas dampingan.

Tabel 4.7. Jenis Kegiatan yang dilakukan Pendamping, Tim Pangan Desa dan Pokja Tingkat Kabupaten pada Desa Tahap Persiapan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| Desa   |              | Kec.         | Jenis Kegiatan  | Pelaksana Kegiatan |     |           |                     |                   | Out Put  |
|--------|--------------|--------------|---|--------------------|-----|-----------|---------------------|-------------------|--|
|        |              |              |   | Pendamping         | TPD | Pokja Kab | Institusi Pelaksana | Pencacah/Pengawas |  |
| Pelaik | Sungai Buaya | -Kayan Hilir | A. Seleksi Lokasi Sasaran   | -                  | -   | V         | V                   | -                 | Terpilhnya 1 desa (Desa Tirta Karya) sebagai sasaran Proksi Demapan 2008   |
|        |              |              | B. Sosialisasi Program di Tingkat Kabupaten dan Sosialisasi di Tingkat Desa | V                  | V   | V         | V                   | V                 | Tersosialisasikannya Program di Tingkat Kab dan di 1 Desa sasaran  |
|        |              |              | C. Pengorganisasian   | V                  | -   | -         | V                   | -                 | Terbentuknya struktur organisasi   |
|        |              |              | D. Rekrutmen  | -                  | -   | -         | V                   | -                 | Di tetapkannya 1 (dua) orang pendamping untuk 1 desa sasaran   |
|        |              |              | E. Pendataan Desa Sasaran (DDRT)  | V                  | V   | V         | V                   | V                 | Terdatanya seluruh KK di 1 desa sasaran; Desa Tirta Karya : 215 KK dengan 150 Rumah Tangga Miskin, sedangkan untuk |
|        |              |              | F. Penyusunan Data Base hasil DDRT  | -                  | -   | -         | V                   | -                 | Tersusunnya Data Base 1 desa sasaran   |
|        |              |              | G. Pendataan Ulang (SRT)  | -                  | -   | -         | -                   | -                 |  |
|        |              |              | H. Pemberdayaan Kelompok Afinitas   | V                  | V   | V         | V                   | -                 | Terbentuknya kelompok Afinitas, Terlatihnya 50 sasaranRumah Tangga Miskin di masing-masing desa sasaran            |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Tugas Pendamping pada Tahap Penumbuhan adalah mengembangkan dinamika kelompok afinitas, menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif kelompok, meliputi usaha *on farm*, *off farm*, maupun *nonfarm*. menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan P2KPG untuk kelompok wanita, usaha tepung-tepungan dan anak SD/MI serta kelompok lumbung pangan masyarakat bersama Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten; bersama Tim Pangan Desa menyusun materi/bahan penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; bersama Tim Pangan Desa menyusun menu makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat; mendampingi kelompok dalam menyusun rencana, jadwal kegiatan, sosialisasi, demonstrasi, dan pengembangan pekarangan; penguatan kapasitas kesehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan jaringan usaha, penerapan teknologi tepat guna, pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulan.

Tabel 4.8. Tugas Pendamping pada Tahap Penumbuhan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kegiatan  | Waktu                                | Keterangan   | Output   |
|----|---|--------------------------------------|--|--|
| 1  | Menyiapkan data statistik kelompok binaan.                              | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Lokasi, identitas pengurus dan keanggotaan kelompok. | Data statistik kelompok mandiri pangan.  |
| 2  | Mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan dan administrasi kelompok. | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Catatan harian dan bulanan kegiatan kelompok         | pembukuan & pencatatan yang dibuat kelompok : Buku pertemuan kelompok, Daftar kehadiran anggota, Agenda pertemuan, Hasil pertemuan Administrasi keuangan |



sambungan Tabel 5.5.

|   |  |                                      |   |   |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
|   |  |                                      |   | kelompok, Buku kas, Buku kas harian, Buku pas anggota (buku simpan pinjam anggota), Arsip tanda bukti, Buku simpan pinjam, Kwitansi penerimaan, Kwitansi pembayaran, Perjanjian pembayaran. |
| 3 | Memantau dan melaksanakan kegiatan sesuai program kerja pendamping   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Perkembangan kegiatan dilihat dari pengembangan sistem ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi, konsumsi).   | Laporan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa mapan  |
| 4 | Mendampingi kelompok dalam menyalurkan & mengembangkan dana bansos   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Rekomendasi pemanfaatan dana dan jenis usaha.   | Laporan perkembangan dan pemanfaatan dana bansos.   |
| 5 | Mendampingi kelompok dalam menyusun laporan keuangan.  | Sesuai rencana kegiatan pendampingan |   | Laporan keuangan kelompok   |
| 6 | Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kelompok afinitas, kelompok wanita, kelompok lumbung.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Merancang dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat.  | -Perubahan perilaku dan perkembangan organisasi kelompok. - Peningkatan pendapatan. - Peningkatan ketrampilan on farm/off farm/non farm)  |
| 7 | Mengembangkan sistem ketahanan pangan (ketersediaan – distribusi – konsumsi) dalam lingkup kelompok rumah tangga miskin dan masyarakat desa sasaran. | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | -Memberikan pemahaman tentang ketahanan pangan dalam rumah tangga dan masyarakat. -Memantau, berkoordinasi dan memberikan tindakan terhadap kondisi rumah tangga rawan pangan & gizi. | Kegiatan dan laporan pengembangan cadangan pangan, pemantauan dan pengembangan sistem distribusi dan harga pangan, perilaku konsumsi pangan yang sehat, beragam, bergizi dan seimbang.      |
| 8 | Bersama Tim Pangan dan Aparat desa merancang program kerja di desa berdasarkan perencanaan desa partisipatif.  | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Hasil perencanaan desa partisipatif.  | Rencana kerja dan <i>time schedule</i> pengembangan sarana prasarana pendukung desa mandiri pangan.   |

sambungan Tabel 5.5.

|    |   |                                      |  |  |
|----|---|--------------------------------------|--|--|
| 9  | Membuat evaluasi kegiatan dari aspek sosial/budaya, ekonomi dan lingkungan.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Hasil pemantauan kondisi sosial, budaya, kesejahteraan dan SDA setempat. | Hasil evaluasi aspek sosial/budaya, kegiatan perekonomian, pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA. |
| 10 | Bersama Tim Penggerak PKK meningkat ketrampilan untuk pemanfaatan pekarangan.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Program kerja Tim Penggerak PKK  | Pemanfaatan pekarangan untuk usaha produktif dan konsumsi rumah tangga.                                |
| 11 | Bersama penyuluh & aparat meningkatkan teknologi budi daya produksi pangan  | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi dan program magang.       | Hasil pengembangan teknologi budi daya atau produksi pangan wilayah                                    |
| 12 | Memantau ketersediaan saprodi & permodalan usaha.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Kebutuhan saprodi dan permodalan kelompok.                               | Jalur distribusi saprodi dan alternatif sumber permodalan.   |
| 13 | Bersama aparat melakukan pemantauan SKPG  | Sesuai rencana kegiatan pendampingan |  | Laporan kondisi pangan dan gizi.   |
| 14 | Bersama aparat mengembangkan pasar  | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Menekatkan akses pasar bagi masyarakat                                   | Pasar komoditas unggulan spesifik lokasi   |
| 15 | Memantau dan memutus rantai distribusi pangan & pedagang pengepul yang merugikan petani.  | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Menekan margin pemasaran yang terlalu tinggi.                            | Koordinasi pedagang perantara dan petani produsen.   |
| 16 | Mengembangkan jaringan pemasaran.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Mengembangkan rantai pemasaran melalui koperasi.                         | Jaringan pasar antar wilayah   |
| 17 | Mengembangkan produk pangan lokal dan pangan olahan kerjasama dengan pihak terkait (perindustrian, pabrik, Perguruan Tinggi, dll) | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Pelatihan ketrampilan dan pengolahan pangan yang bermutu, berkualitas.   | Pangan olahan yang aman, berkualitas dan bergizi.  |
| 18 | Merencanakan perbaikan sarana transportasi yang dibutuhkan.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Usulan perbaikan sarana transportasi kepada Dinas PU                     | Laporan pelaksanaan perbaikan sarana transportasi  |
| 19 | Bersama Tim Pangan Desa memperkuat LKD.   | Sesuai rencana kegiatan pendampingan | Peningkatan kapasitas Pengurus   | Optimalisasi peran Lembaga Permodalan Perdesaan  |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Pendampingan pada tahap pengembangan masyarakat dilakukan untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok afinitas. Ruang lingkup pendampingan tahap pengembangan meliputi : Pendampingan untuk penguatan kapasitas anggota kelompok. Pendampingan untuk pengembangan mengakses



permodalan. Pendampingan untuk pengembangan usaha produktif kelompok yang meliputi usaha *on farm*, *off farm*, maupun *non farm*.

Kegiatan pendampingan masyarakat pada tahap kemandirian merupakan tahap pelimpahan tugas tenaga pendamping kepada Tim Pangan Desa (TPD). Pada tahun ke IV, kinerja pendamping akan dilanjutkan oleh TPD. Untuk itu pada Tahap Kemandirian, pendamping mempersiapkan exit strategi pemberdayaan kelompok afinitas, penyerahan tugas pengembangan sistem ketahanan pangan tingkat desa, dan menginformasikan pencapaian kinerja yang akan dilanjutkan oleh TPD serta memberikan strategi untuk memperoleh dan mengembang dukungan lintas sektor serta mengoptimalkan pengelolaan dalam pemanfaatan sarana prasarana usahatani. Berakhirnya peran pendamping di tahun keempat, diartikan bahwa pendamping tidak diberikan honor dari pemerintah, namun pendamping mampu mandiri sebagai fasilitator dan motivator masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun ruang lingkup pendampingan di tahap kemandirian meliputi Pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas anggota Kelompok. Pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan keuangan dan permodalan. Pendampingan dalam rangka pengembangan usaha produktif kelompok.

Tabel 4.9. Tugas Pendamping pada Tahap Kemandirian Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kegiatan  | Waktu                                      | Keterangan  |
|----|---|--|---|
| 1  | Membuat evaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan pendampingan dari aspek pemberdayaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan sarana prasarana fisik serta dampaknya bagi kelompok afinitas pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. | Belum Sesuai rencana kegiatan pendampingan | out put berupa Hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan belum ada. Perkembangan kegiatan usaha produktif anggota kelompok afinitas. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Tingkat pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan. |
| 2  | Melakukan phase out (serah terima) kegiatan pendampingan masyarakat kepada Tim Pangan Desa (TPD) dengan menyusun rencana kerja yang masih perlu dilanjutkan.  | Belum Sesuai rencana kegiatan pendampingan | out put berupa Program Kerja Pendampingan dan rencana kerja belum berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan   |
| 3  | Membuat rancangan strategi peningkatan kemandirian kelompok berdasarkan evaluasi pendampingan yang telah dilakukan.   | Belum Sesuai rencana kegiatan pendampingan | out put berupa Strategi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.  |
| 4  | Memberikan rekomendasi kepada aparat atau pihak terkait dalam usaha pengembangan jaringan dan perluasan akses permodalan.   | Belum Sesuai rencana kegiatan pendampingan |   |
| 5  | Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.   | Belum Sesuai rencana kegiatan pendampingan | out put berupa Perubahan perilaku dan perkembangan organisasi kelompok. - Peningkatan pendapatan. -Peningkatan ketrampilan on farm/off farm/non farm)   |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK merupakan bagian dari kebijakan pembangunan di bidang pertanian. Guna mendukung

kebijakan dimaksud tentunya diperlukan informasi atau sosialisasi mengenai pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK itu sendiri.

Tabel 4.10. Tugas Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Sosialisasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| Tugas Pusat   | Tugas Propinsi  | Tugas Kabupaten/Kota   |
|---|---|--|
| Melaksanakan sosialisasi di tingkat Pusat dan propinsi.               | Melaksanakan sosialisasi di propinsi dan Kabupaten/Kota.    | Melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota dan desa.         |
| Melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Pokja Pusat dan propinsi | Melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Pokja Propinsi | Melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Pokja Kabupaten |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Sosialisasi program dilaksanakan dengan menggunakan forum Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Daerah untuk mendapatkan dukungan kegiatan Instansi lintas sektor. Waktu sosialisasi untuk Propinsi : Februari – Maret, Kabupaten : Maret – April, sedangkan Desa disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.



Jadwal Sosialisasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Jadwal Sosialisasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kecamatan   | Sosialisasi Tingkat Kecamatan      | Sosialisasi Tingkat Desa           |
|----|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Kayan Hilir | Dilaksanakan pada bulan April 2006 | Dilaksanakan pada bulan April 2006 |
| 2. | Serawai     | Dilaksanakan pada bulan Mei 2007   | Dilaksanakan pada bulan Mei 2007   |
| 3. | Ambalau     | Dilaksanakan pada bulan Mei 2007   | Dilaksanakan pada bulan Mei 2007   |
| 4. | Ket. Tengah | Dilaksanakan pada bulan Mei 2008   | Dilaksanakan pada bulan Mei 2008   |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut : Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai koordinator pelaksana program. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Pokja Desa Mapan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten bertindak sebagai pelaksana kegiatan desa mapan. Pokja ini berada dalam Dewan Ketahanan Pangan. Camat bertindak sebagai koordinator desa



pelaksana program aksi desa mapan di wilayah kerjanya. Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab operasional program aksi desa mapan di tingkat desa. Tim Pangan Desa bertindak sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di Desa.

Tabel 4.12. Pembentukan Dan Keanggotaan Tim Pangan Desa Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Pembentukan dan Keanggotaan Tim Pangan Desa   |
|----|---|
| 1. | SK Bupati Nomor 715 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober Tahun 2006 dengan :<br>Ketua : Kepala Desa<br>Sekretaris : PPL<br>PKK : 1 Orang<br>Wakil Masyarakat Miskin : 2 orang               |
| 2. | SK Bupati Nomor 492 Tahun 2007 Tanggal 30 Agustus Tahun 2007 dengan :<br>Ketua : Kepala Desa<br>Sekretaris : Tokoh Masyarakat<br>PKK : 1 Orang<br>Wakil Masyarakat Miskin : 2 orang |
| 3. | SK Bupati Nomor 492 Tahun 2007 Tanggal 30 Agustus Tahun 2007 dengan :<br>Ketua : Kepala Desa<br>Sekretaris : Tokoh Masyarakat<br>PKK : 1 Orang<br>Wakil Masyarakat Miskin : 2 orang |
| 4. | Sk. Bupati Nomor 536 Tahun 2008 Tanggal 1 Agustus 2008 dengan :<br>Ketua : Kepala Desa<br>Sekretaris : Tokoh Masyarakat<br>PKK : 1 Orang<br>Wakil Masyarakat Miskin : 2 orang       |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Program pengembangan desa mandiri pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program aksi secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan

pusat. Untuk Tingkat Desa, Kepala Desa sebagai penanggung jawab Program Desa Mandiri Pangan di tingkat desa bertugas untuk mengkoordinasikan Tim Pangan Desa, kelompok masyarakat, dan pendamping di desa tersebut. Selain itu Kepala Desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Tim Pangan Desa terdiri dari 6 (enam) orang yaitu aparat desa (1 orang), tokoh masyarakat (1 orang), perwakilan dari masyarakat khususnya masyarakat miskin (2 orang), kader gizi /bidan desa (1 orang), dan Ketua Tim Penggerak PKK (1 orang). Pada tahun kedua tim pangan desa ditambah satu orang petugas Lembaga Keuangan Desa.

Tim ini bertugas bersama pendamping untuk merumuskan, merencanakan dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan desa mandiri pangan. Hasil kegiatan akan dilaporkan kepada pengelola program serta dievaluasi hasil pelaksanaannya. Tim Pangan Desa akan menggantikan peran pendamping, setelah tahapan Program Aksi Desa Mandiri Pangan berakhir. Tugas dan Fungsi Tim Pangan tingkat desa, dibantu oleh Pendamping dalam : mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan, distribusi, konsumsi, akses, dan pemanfaatan pangan maupun situasi gizi masyarakat; menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan; mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan; mengadakan pertemuan Tim Pangan Desa minimal satu bulan sekali.



Tabel 4.13. Tugas Tim Pangan Desa Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Tahap        | Kegiatan   | Waktu  | Keterangan   | Output  |
|----|--------------|--|--|--|---|
| 1  | Persiapan    | <p>a. Mengenali kondisi, potensi dan masalah ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.</p> <p>b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan.</p> <p>c. Mengintegrasikan berbagai program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p>  | Setelah desa terpilih  | Dilakukan melalui Pertemuan Tim Pangan Desa dan pertemuan kelompok | <p>a. Data potensi desa belum lengkap</p> <p>b. Laporan situasi pangan dan gizi serta perkembangan pelaksanaan proksi mandiri pangan belum lengkap</p> <p>c. Integrasi program pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan belum ada</p> |
| 2  | Penumbuhan   | <p>a. Mengumpulkan data-data potensi dan permasalahan ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi, akses dan pemanfaatan pangan maupun situasi dan kondisi gizi masyarakat.</p> <p>b. Menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan di tingkat desa bersama-sama dengan kelompok afinitas dan pendamping.</p> <p>c. Memverifikasi usulan rencana usaha yang diajukan oleh kelompok dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana bansos Bersama pendamping menumbuhkan LKD</p> | Disesuaikan dengan perkembangan kelompok dan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan desa | Dilakukan melalui Pertemuan Tim Pangan Desa dan pertemuan kelompok | <p>a. Laporan Situasi Pangan dan Gizi di desa belum rutin</p> <p>b. Rencana pembangunan ketahanan pangan ditingkat desa belum lengkap</p> <p>c. Hasil Verifikasi usulan rencana usaha kelompok belum ada</p> <p>d. Tumbuhnya LKD</p>                    |
| 3  | Pengembangan | <p>a. Bersama pendamping mendampingi kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kelompok</p> <p>b. Bersama pendamping memperkuat dan meningkatkan peran kelembagaan masyarakat</p>   | Dilakukan setiap waktu   | Dilakukan melalui Pertemuan Tim Pangan Desa dan pertemuan kelompok | <p>a. Terjadinya diversifikasi usaha</p> <p>b. Terjadinya peningkatan pendapatan usaha</p> <p>c. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat</p>   |
| 4  | Kemandirian  | <p>a. Melanjutkan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat</p> <p>b. Memantau dan melaporkan masalah pangan kepada aparat desa/pokja</p> <p>c. Menyusun rencana tindak lanjut</p> <p>d. Memantau dan melanjutkan kegiatan proksi mapan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan</p>   | Dilakukan setiap waktu   | Dilakukan melalui Pertemuan Tim Pangan Desa dan pertemuan kelompok | <p>a. Lahirnya kader pangan desa</p> <p>b. Tumbuhnya usaha produktif di masyarakat</p> <p>c. Terwujudnya cadangan pangan tingkat rumah tangga dan masyarakat</p>  |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Pokja tingkat kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/ Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota dengan anggota dinas-dinas yang terkait dengan ketahanan pangan. Tugas dan Fungsi Pokja tingkat Kabupaten/Kota: melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota, kecamatan dan desa; melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan; melakukan identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan; merumuskan pengembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten/Kota

Tugas lainnya adalah melakukan supervisi terhadap kegiatan kelompok afinitas desa Mapan, Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG), serta Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat; menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi dan Pusat; mengadakan Pertemuan Pokja kabupaten minimal 3 bulan sekali.

Berdasarkan uraian tersebut, Pembentukan dan Keanggotaan Pokja Kabupaten Program Aksi Mandiri Pangan di Desa Pelaik ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 652 Tahun 2006 Tanggal 11 September Tahun 2006 dengan susunan :

Ketua : Dinas Pertanian (Kasubdin Tanaman Pangan).

Sekretaris : Dinas Pertanian (Kasubdin Penyuluhan)

Anggota : Dinas Kesehatan, Bulog, BKKBN, BPS, BRI dan Camat



**Tabel 4.14.** Pembentukan dan Keanggotaan Pokja Kabupaten Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kecamatan             | Pembentukan dan Keanggotaan Pokja Kabupaten  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Kayan Hilir (TA.2006) | SK Bupati Nomor 652 Tahun 2006 Tanggal 11 September Tahun 2006 dengan susunan :<br>Ketua : Dinas Pertanian (Kasubdin Tanaman Pangan).<br>Sekretaris : Dinas Pertanian (Kasubdin Penyuluhan)<br>Anggota : Dinas Kesehatan, Bulog, BKKBN, BPS, BRI dan Camat       |
| 2. | Serawai               | SK Bupati Nomor 489 Tahun 2007 Tanggal 30 Agustus Tahun 2007 dengan susunan :<br>Ketua : Dinas Pertanian (Kasubdin Tanaman Pangan).<br>Sekretaris : Dinas Kesehatan<br>Anggota : Bappeda, BKKBN, Pertanian (Kasubdin Penyuluhan, Kasi Bina Usaha Tanaman Pangan) |
| 3. | Ambalau               | SK Bupati Nomor 489 Tahun 2007 Tanggal 30 Agustus Tahun 2007 dengan susunan :<br>Ketua : Dinas Pertanian (Kasubdin Tanaman Pangan).<br>Sekretaris : Dinas Kesehatan<br>Anggota : Bappeda, BKKBN, Pertanian (Kasubdin Penyuluhan, Kasi Bina Usaha Tanaman Pangan) |
| 4. | Ket. Tengah           | SK Bupati Nomor 33 Tahun 2008 Tanggal 13 Juni 2008 dengan susunan :<br>Ketua : Dinas Pertanian (Kasubdin Penyuluhan)<br>Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga<br>Anggota : Bappeda, BPS, Bulog, Dinas Pertanian      |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Peta kewenangan dalam pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan dibagi menjadi kewenangan pusat, kewenangan propinsi, dan kewenangan kabupaten. Kewenangan Kabupaten adalah menyusun petunjuk teknis



pelaksanaan Desa Mandiri Pangan; melakukan seleksi dan menetapkan lokasi desa pelaksana program Aksi Desa Mandiri Pangan; menyusun rencana pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lain; bersama propinsi menyeleksi dan mengajukan calon tenaga pendamping ke pusat; menyusun data base bersama propinsi; menyelenggarakan pelatihan untuk aparat pelaksana di tingkat kecamatan, desa, Tim Pangan dan kelompok afinitas; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Aksi Desa Mandiri Pangan ke propinsi; mengadakan forum pengaduan masyarakat.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan pelatihan dasar kepada : pendamping/pembina kemitraan, pamong desa, aparat tingkat kabupaten/kecamatan, petani/kelompok afinitas dan pengurus kelembagaan petani. Pelatihan yang dilaksanakan di propinsi adalah pelatihan pendampingan dan pelatihan IRA, sedangkan pelatihan tingkat desa dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pelatihan tersebut dibiayai oleh APBD dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Balai Diklat SDM di daerah.

Dukungan dana APBD Kabupaten Sintang dalam rangka pembinaan kegiatan desa mandiri pangan selalu dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 sebesar Rp. 40.000.000,-, tahun 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-, sedangkan tahun 2008 sebesar Rp. 80.000.000,-. Dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan disediakan dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang bagi pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. Dana bantuan

sosial merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha produktif. Dana bantuan sosial untuk pertanian dipergunakan untuk kegiatan usaha agribisnis maupun usaha ketahanan pangan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga. Semua kegiatan dikelola oleh kelompok dan penentuan penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok.

Jumlah dana bantuan sosial dari APBN untuk desa baru (pelaksana tahun 2009) adalah sebesar Rp 100 juta/desa, sedangkan untuk desa lama mendapatkan tambahan dana 20 juta per desa. Pencairan dana bantuan sosial TA. 2009 dari KPPN ke rekening kelompok dilaksanakan paling lambat bulan November 2009. Untuk tambahan dana Rp 20 juta bagi desa lama dapat segera dicairkan. Pengambilan dana bantuan sosial sebagai modal usaha kelompok dilakukan secara bertahap sesuai rencana program kerja kelompok yang dimuat dalam proposal atas rekomendasi Tim Pangan Desa dan pendamping. Pengambilan dan penggunaan dana bantuan sosial TA.2009 dilakukan dalam 3 tahap dengan melihat kesiapan usaha dan kinerja kelompok : Tahap I pengambilan sebesar 30 persen digunakan pada bulan Maret 2010. Tahap II pengambilan sebesar 30 persen digunakan pada bulan Mei 2010. Tahap III pengambilan sebesar 40 persen digunakan pada bulan Juli 2010.



Tabel 4.15. Realisasi Penyaluran PMUK Di Kabupaten Sintang

| No | Kecamatan             | Dana APBN    |                |     | Dana APBD  |                |     |
|----|-----------------------|--------------|----------------|-----|------------|----------------|-----|
|    |                       | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | %   | Alokasi    | Realisasi (Rp) | %   |
| 1. | Kayan Hilir (TA.2006) | 120.000.000  | 120.000.000    | 100 | 0          | 0              | 0   |
| 2. | Serawai (TA. 2007)    | 80.000.000   | 80.000.000     | 100 | 0          | 0              | 0   |
| 3. | Ambalau (TA. 2007)    | 80.000.000   | 80.000.000     | 100 | 0          | 0              | 0   |
| 4. | Ket. Tengah           | 80.000.000   | 80.000.000     | 100 | 50.000.000 | 50.000.000     | 100 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kinerja kelompok yaitu: Mempunyai kelengkapan organisasi; Tertib administrasi dan keuangan; Transparan dalam pengelolaan keuangan kelompok; Memiliki Rencana Usaha Kelompok; Mempunyai tabungan kelompok; Dukungan kelompok menyediakan fasilitas usaha seperti: perkandangan jika ingin beternak; kolam ikan jika ingin memelihara ikan; lahan untuk bercocok tanam dll. Permodalan internal merupakan permodalan kelompok yang dananya dihimpun dari anggota kelompok seperti simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, tabungan, jasa pinjaman dan keuntungan usaha. Permodalan internal yang dimiliki oleh kelompok menjadi salah satu syarat dalam usulan pemanfaatan dana bantuan sosial. Permodalan eksternal adalah permodalan kelompok yang diperoleh dari

sumber-sumber di luar kelompok seperti dana bantuan sosial, Bank, hibah dan pinjaman dari lembaga lain (Internasional, LSM, swasta dan BUMN).

Penumbuhan Usaha Kelompok dilakukan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Potensi dan permasalahan di tingkat kelompok menjadi urutan prioritas kegiatan usaha yang akan ditindaklanjuti dan dikembangkan. Kegiatan-kegiatan usaha kelompok atau masyarakat dianalisa secara sederhana dengan bantuan pendamping untuk menentukan kegiatan usaha prioritas yang dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan potensi wilayah, manfaat bagi masyarakat, kemauan dan kemampuan masyarakat. Jenis Usaha yang dijalankan tidak harus berupa usaha kelompok, dapat juga usaha individu yang tergabung dalam kelompok. Kegiatan Usaha yang diajukan harus dilengkapi dengan rencana usaha. Apabila dalam 1(satu) kelompok terdapat lebih dari 1(satu) kegiatan usaha, maka rencana usaha yang dibuat harus mencerminkan keseluruhan usaha yang akan dijalankan. RUK memuat jenis usaha kelompok, perkiraan biaya serta lamanya usaha yang akan dijalankan. RUK diajukan untuk memperoleh dana bantuan sosial, besarnya disesuaikan dengan rencana anggaran yang diajukan. Untuk mendukung usaha kelompok, setiap anggota mengumpulkan simpanan wajib, simpanan sukarela maupun tabungan.

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan : Kegiatan *on farm* : 1) Usahatani tanaman pangan, hortikultura, 2) Usaha dibidang peternakan/ perikanan, 3) Usaha tani dibidang perkebunan. Kegiatan *off farm* : 1) Distribusi dan pemasaran produk pertanian/perikanan/peternakan/perkebunan, 2) Pengembangan Jasa Alsintan, 3)



Pengolahan Hasil Pertanian/Perikanan/Peternakan/ Perkebunan. Pengembangan usaha *non farm* : 1) Penyediaan saprodi dan jasa alsintan, 2) Simpan pinjam, 3) Industri/ kerajinan rumah tangga.

Rencana Usaha Kelompok Kelima Desa Mandiri Pangan, adalah sebagai berikut: Desa Pelaik Kec. Kayan Hilir (T.A. 2006) beranggotakan 50 KRTM, adapun rencana usaha terpilih yaitu : Ternak Ayam potong. Desa sungai Buaya Kec. Kayan Hilir (T.A. 2006 ) beranggotakan 50 KRTM, adapun rencana usaha terpilih meliputi ; Budidaya Sayur-sayuran, Palawija (Jagung), Padi (Sawah), dan Budidaya perikanan. Desa Nanga Serawai Kec. Serawai (T.A. 2007) beranggotakan 50 KRTM, adapun rencana usaha terpilih yaitu : Usaha Ternak Babi. Desa Nanga Ambalau Kec. Ambalau (T.A. 2007) beranggotakan 50 KRTM, adapun rencana usaha terpilih yaitu : Usaha ternak ayam potong dan ternak babi. Desa Tirta Karya Kec. Ketungau Tengah ( TA. 2008 ) beranggotakan 50 KRTM, adalah rencana usaha Budidaya ikan dan simpan pinjam.

Dalam rangka mendukung usaha kelompok, aparat kabupaten dan pendamping agar dapat mengupayakan hubungan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan usaha kelompok seperti sarana produksi pertanian, pemasaran hasil, teknologi, peralatan, permodalan dll. Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai Program Aksi Desa Mandiri Pangan berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber dana lainnya, yang disalurkan melalui instansi dan lembaga terkait dalam pembangunan wilayah perdesaan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Pemanfaatan dana sesuai



dengan tupoksi yang ada di masing-masing instansi terkait untuk mendukung Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

Pembiayaan operasional Program Aksi Desa Mandiri Pangan berasal dari alokasi dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta alokasi dana yang ada di masing-masing instansi lintas sektoral yang pemanfaatannya untuk mendukung program pembangunan wilayah perdesaan. Dana APBN yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dialokasikan di tingkat pusat, propinsi (dana dekonsentrasi), dan Kabupaten/Kota (dana tugas pembantuan). Untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, maka Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan dukungan dana pembangunan wilayah perdesaan untuk Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang berasal dari instansi lintas sektor diatur menurut ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.

Sumber Pembiayaan Modal Masyarakat dari internal dan eksternal. Permodalan internal merupakan permodalan kelompok yang dananya dihimpun dari anggota kelompok seperti simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, tabungan, jasa pinjaman dan keuntungan usaha. Permodalan internal yang dimiliki oleh kelompok menjadi salah satu syarat dalam usulan pemanfaatan dana Bansos. Permodalan eksternal adalah permodalan kelompok yang diperoleh dari sumber-sumber di luar kelompok seperti Bank, hibah dan pinjaman dari lembaga lain (Internasional, LSM, swasta dan BUMN), dan *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR). Dukungan APBN, setiap desa pelaksana Desa Mandiri Pangan diberikan dana bantuan sosial dari pemerintah sebagai stimulan usaha yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang dilakukan masyarakat dan disalurkan melalui kelompok afinitas. Jumlah alokasi APBN tahun 2009 yang disalurkan sebagai dana bantuan sosial ke desa baru masing-masing sebesar Rp. 100 juta, sedangkan desa lama mendapatkan tambahan dana Rp.20 juta per desa yang sebelumnya sudah menerima Rp.80 juta. Bantuan tersebut disalurkan melalui rekening kelompok afinitas.

Pengelolaan dana bantuan sosial mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Nomor: 03/Permentan/KU.140/1/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 dan Nomor: 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- b. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan menerbitkan Surat Edaran tentang pencairan dana bansos;
- c. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menerbitkan Pedoman Teknis Program Kerja dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2009;



- d. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menerbitkan Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2009;
- e. KPA/PPK Kabupaten membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok afinitas.
- f. KPA/PPK Kabupaten membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pembuat SPM/Penguji SPP Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan kabupaten dengan melampirkan: (1). SK penetapan kelompok afinitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten; (2). Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) Afinitas dengan mencantumkan: (a). Nama dan alamat lengkap kelompok afinitas penerima dana kegiatan Desa Mandiri Pangan; (b). Nomor Rekening Ketua kelompok afinitas penerima dana bantuan; (c). Nama dan alamat kantor cabang bank tempat kelompok afinitas penerima dana bantuan membuka rekening; (d). Rincian penggunaan dana kegiatan usaha kelompok. (3). Surat Perjanjian kerjasama antara KPA/PPK dengan kelompok harus ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Afinitas dengan meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)
- g. KPA/PPK kabupaten/kota melalui bendahara pengeluaran mengajukan Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dengan melampirkan: (1). Ringkasan RUK Afinitas; (2). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); (3). Surat Pernyataan KPA .

- h. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- i. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan entransfer dana bansos ke rekening kelompok afinitas.

Tabel 4.16. Perkembangan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Sintang

| No | Kecamatan/<br>Desa                 | Kelompok Tani            |            |            |                                  | Pemerintahan<br>Desa injangan                                       | Pinjaman<br>yg Sdh<br>Dibembeli<br>kan | Pinjaman<br>yg sdh<br>dipinir<br>kan | Penerima<br>Penguliran<br>Dana<br>berikannya | Ket.   |
|----|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|
|    |                                    | Nama                     | Ketua      | Jml<br>Agt | Dana<br>PMUK<br>yang<br>diterima |   |  |                                      |  |  |
| 1. | KAYAN<br>HILIR<br>/PELAIK          | Pelak<br>Mandiri<br>Jaya | Lewis      | 50         | 60.000.000                       | pengembangan<br>usaha<br>kelompok<br>dibidang<br>peternakan<br>syan | 5.000.000                              | 0                                    | Kelompok<br>baru                             | PMUK<br>TA 2006<br>dicairka<br>n pd<br>bulan<br>juni<br>2007 |
| 2  | KAYAN<br>HILIR<br>/SUNGAI<br>BUAYA | Inggar<br>Keraya         | Indum      | 50         | 60.000.000                       | Pengembangan<br>usaha<br>kelompok<br>dibidang<br>peternakan<br>syan | 5.000.000                              | 0                                    | Kelompok<br>Baru                             | PMUK<br>TA 2006<br>dicairka<br>n pd<br>bulan<br>juni<br>2007 |
| 3  | SERAWAI/<br>NANGA<br>SERAWAI       | Karya<br>Utama           | Juang Saik | 50         | 80.000.000                       | pengembangan<br>usaha<br>kelompok<br>dibidang<br>peternakan<br>Babi | 0                                      | 0                                    | Kelompok<br>baru                             |  |
| 4  | AMBALAU<br>/NANGA<br>AMBALAU       | Usaha<br>Bersama         | A.P.Rustam | 50         | 80.000.000                       | pengembangan<br>usaha<br>kelompok<br>dibidang<br>peternakan<br>Babi | 0                                      | 0                                    | Kelompok<br>Baru                             |  |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, 2009.

Pengendalian kegiatan Kegiatan PMUK Pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan oleh PPK dan KPA. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi



kepada pihak terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Pokja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Desa melaporkan pada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dengan formulir yang telah disepakati. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke kabupaten/kota dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan form yang telah disepakati. Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke propinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada desa dan kecamatan serta melakukan *follow up* terhadap kondisi yang memerlukan penanganan segera

atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat kabupaten/kota. Propinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan dan melaporkan ke pusat sesuai dengan format yang disepakati. Selanjutnya propinsi memberikan *feedback* kepada kabupaten/kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat propinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan pemantauan kegiatan lapang secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan propinsi dan selanjutnya memberikan *feedback* kepada propinsi atau melakukan *follow up* terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola program tingkat pusat.

Pelaporan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Periode pelaporan dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan pada akhir tahun. Pelaporan Tingkat Desa, Pendamping melaporkan aktivitasnya dan kegiatan kelompok setiap bulan kepada kabupaten/kota.

Tim Pangan Desa (TPD) melaporkan aktivitasnya setiap 4 bulan kepada kabupaten. Lembaga Keuangan Desa melaporkan kegiatannya setiap semester. Kepala Desa melaporkan perkembangan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan kepada Bupati/Walikota setiap semester.

Pelaporan di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan di tingkat desa dan kabupaten/kota setiap 3 bulan sekali kepada propinsi.



Kabupaten/Kota membuat laporan evaluasi akhir Program Aksi Desa Mandiri Pangan setiap tahun dan melaporkannya kepada propinsi dan pusat. Kabupaten melaporkan realisasi keuangan (Dana Tugas Pembantuan) ke pusat setiap bulan.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan dirancang dalam kurun waktu 4 tahun, melalui 4 tahapan yang diharapkan mencapai kemandirian. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap penumbuhan, (3) tahap pengembangan dan (4) tahap kemandirian.

Tahap persiapan, antara lain : seleksi desa rawan pangan, terbentuknya kelompok KK miskin sasaran, data base karakteristik kemasyarakatan, dan profil desa yang menggambarkan kondisi potensi dan permasalahan ketahanan pangan serta perencanaan pembangunan desa partisipatif yang dikoordinasikan oleh Pendamping, Tim Pangan Desa (TPD) dan Aparat desa setempat.

Pada tahap penumbuhan, mulai ditumbuhkan usaha-usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok afinitas, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan. Pada tahap ini mulai ditumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai lembaga layanan modal, berfungsinya posyandu dan kader gizi serta bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana dalam ketahanan pangan wilayah pedesaan.

Pada tahap pengembangan, terdapat peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif dan modal sosial kemasyarakatan yang mengarah pada peningkatan skala usaha, peningkatan modal yang dikelola masyarakat dalam wadah LKD,

pembangunan sarana prasarana wilayah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang dikoordinasikan oleh TPD sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan desa.

Tahap kemandirian ditunjukkan adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif yang mampu meningkatkan daya beli dan meningkatnya jaringan kemitraan yang ditandai munculnya usaha kecil, usaha mikro pedesaan di bidang pangan dan non pangan serta tumbuhnya gapoktan yang mandiri dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal. Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta berfungsinya TPD yang mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan ketahanan pangan desa, yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usahatani melalui program lintas sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui Pencapaian Tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.17. Pencapaian Tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik

| No | Strategi pencapaian tujuan  | Capaian  |
|----|---|--|
| 1  | Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat  | pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat belum dilaksanakan mulai dari perencanaan |
| 2  | Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan stake holder untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan | stake holders yang terlibat terbatas pada pemerintah Desa dan Kelompok Tani                                    |
| 3  | Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel  | Kelompok Tani yang dibentuk belum akuntabel  |
| 4  | Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan   | partisipasi masyarakat relatif rendah  |
| 5  | Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal   | sumberdaya lokal cukup optimal dimanfaatkan  |
| 6  | Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota                                       | koordinasi antar stakeholder belum sinergis  |

Sumber: Data Observasi, 2009.

Pencapaian Tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik belum optimal. Strategis keberlanjutan program (*Exit Strategis*) program aksi desa mandiri pangan di desa Pelaik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Strategis keberlanjutan program (*Exit Strategis*) Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik

| No | Strategis keberlanjutan program ( <i>Exit Strategis</i> )   | Capaian   |
|----|---|---|
| 1  | Kelompok afinitas akan menjadi kelompok mandiri dalam melakukan usaha produktif dan ketahanan pangan yang akan berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan) | Kelompok afinitas belum menjadi kelompok mandiri dalam melakukan usaha produktif dan ketahanan pangan sehingga belum berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan) |
| 2  | Tim Pangan Desa sebagai embrio yang akan menjadi lembaga koordinasi ketahanan pangan desa   | Tim Pangan Desa belum berperan sebagai lembaga koordinasi ketahanan pangan desa   |
| 3  | Lembaga Keuangan Desa sebagai embrio yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa   | Lembaga Keuangan Desa belum terbentuk   |
| 4  | Mengembangkan aksesibilitas (permodalan, pemasaran, informasi, teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan usaha   | Aksesibilitas (permodalan, pemasaran, informasi, teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan usaha belum terlaksana  |

Sumber: Data Observasi, 2009.

Strategis keberlanjutan program (*Exit Strategis*) Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Pelaik belum optimal. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Kabupaten Sintang (Sumber: Hasil Wawancara, Mei 2009). Mengenai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.19. Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat mengetahui  | 15     | 30         |
| 2      | cukup mengetahui   | 5      | 10         |
| 3      | kurang mengetahui  | 25     | 50         |
| 4      | tidak mengetahui   | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar masyarakat kurang mengetahui bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengetahuan warga masyarakat mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK, dimana sebagian besar menyatakan kurang mengetahui.

Adapun perolehan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20. Perolehan Informasi Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Perolehan Informasi Mengenai Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | dari Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)   | 10     | 20         |
| 2      | dari Pemerintah Kecamatan (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)  | 20     | 40         |
| 3      | dari media massa (radio, Koran, televisi)   | 5      | 10         |
| 4      | dari Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)  | 10     | 20         |
| 5      | dari tetangga/teman/keluarga  | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa perolehan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dari Pemerintah Kecamatan (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll). Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar warga masyarakat menyatakan tidak setuju bila pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK berbentuk program, yaitu jika program itu selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Mereka lebih setuju jika dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK berbentuk proses yaitu pemberdayaan dilakukan secara terus menerus.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah menciptakan hubungan yang harmonis, kondusif, dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat agar berpartisipasi secara sinergis dan berkesinambungan. Salah satu bentuk tersebut adalah dengan berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK (Sumber: Hasil Wawancara, Mei 2009).

Guna mengetahui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.21. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | selalu melibatkan masyarakat  | 21     | 42         |
| 2      | kadang-kadang saja melibatkan masyarakat  | 25     | 50         |
| 3      | tidak pernah melibatkan masyarakat  | 4      | 8          |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kadang-kadang saja masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Hal ini tentunya merupakan permasalahan tersendiri mengingat pemberdayaan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah adanya tanggapan yang positif dari target group/masyarakat. Dengan keterlibatan mereka dalam perencanaan, diharapkan timbul sikap yang positif terhadap implementasi kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK.

Selanjutnya untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22. Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)  | 20     | 40         |
| 2      | Pemerintah Kecamatan  | 15     | 30         |
| 3      | Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)   | 10     | 20         |
| 4      | Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)                                | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa), Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll). Sedangkan Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll) jarang dilibatkan.

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada hakekatnya PP tersebut secara operasional merupakan pemberdayaan masyarakat, untuk berperan aktif dalam mewujudkan aspek penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat perdesaan dengan focus utamanya adalah rumah tangga perdesaan.

Dalam implementasi kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik telah diupayakan untuk melakukan diskusi dengan masyarakat mengenai kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Untuk mengetahui proses diskusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.23. Proses Diskusi Dengan Masyarakat Mengenai Kegiatan Apa Saja Yang Tepat Dilaksanakan Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Proses Diskusi Dengan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | selalu berdiskusi dengan masyarakat  | 20     | 40         |
| 2      | kadang-kadang saja berdiskusi dengan masyarakat  | 25     | 50         |
| 3      | tidak pernah berdiskusi dengan masyarakat  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar menyatakan kadang-kadang saja dilakukan proses diskusi dengan masyarakat mengenai kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK.

Adapun mengenai gagasan, ide dan saran masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.24. Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | sangat sering   | 15     | 30         |
| 2      | cukup sering  | 15     | 30         |
| 3      | jarang  | 15     | 30         |
| 4      | tidak pernah  | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui masyarakat sebenarnya cukup sering menyampaikan gagasan, ide dan saran masyarakat dalam

perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Sedangkan pengakomodasian gagasan, ide dan saran masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25. Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | ya, seluruhnya diakomodasi/ditampung  | 12     | 24         |
| 2      | sebagian besar diakomodasi/ditampung  | 5      | 10         |
| 3      | sebagian kecil diakomodasi/ditampung  | 30     | 60         |
| 4      | tidak ada yang diakomodasi/ditampung  | 3      | 6          |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar gagasan, ide dan saran masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK belum dapat diakomodasi/ditampung. Menurut Kepala Desa Pelaik, banyak gagasan, ide dan saran masyarakat yang tidak sesuai sebagaimana yang dibutuhkan dalam kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Penyebab lainnya adalah masyarakat banyak belum faham mengenai Program PMUK.

Selanjutnya, untuk mengetahui kerja sama antara pendamping dan penyuluh dan warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.26. Kerja Sama Antara Pendamping dan penyuluh Dan Warga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No            | Kerja Sama Antara Pendamping dan penyuluh Dan Warga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|--|-----------|------------|
| 1             | sangat baik  | 15        | 30         |
| 2             | baik   | 15        | 30         |
| 3             | kurang baik  | 15        | 30         |
| 4             | tidak baik   | 5         | 10         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>50</b> | <b>100</b> |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui kerja sama antara pendamping dan penyuluh dan warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK cukup baik. Hasil penelitian juga memperlihatkan masih adanya kekurangsesuaian antara rencana dengan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik.

Jarang sekali terjadi pertentangan antar Kelompok Warga dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Kalaupun terjadi biasanya karena perbedaan pendapat saja, dimana penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah/mufakat.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang salah satu arah pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa

setiap masyarakat memiliki potensi (Sumber: Hasil Wawancara, Mei 2009).

Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27. Suasana Atau Iklim Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Untuk Berkembang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Suasana Atau Iklim Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Untuk Berkembang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sudah diupayakan dan berjalan baik   | 15     | 30         |
| 2      | sudah diupayakan, namun belum berjalan baik  | 30     | 60         |
| 3      | belum/tidak ada upaya sama sekali  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik sudah diupayakan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan upaya memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya perlindungan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik sudah diupayakan, namun belum berjalan baik.

Selanjutnya, untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.28. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Desa Pelaik

| No | Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat  | Keterangan                        |
|----|--|-----------------------------------|
| 1  | Pemberian wewenang kepada masyarakat   | ada, tapi belum berjalan          |
| 2  | Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat  | belum/tidak ada upaya sama sekali |
| 3  | Meningkatkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai potensi untuk melaksanakannya  | belum/tidak ada upaya sama sekali |
| 4  | Pemberian kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya | ada, tapi belum berjalan          |
| 5  | Pemberian tanggungjawab pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu  | ada, tapi belum berjalan          |
| 6  | Pemberian dukungan pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu       | ada, tapi belum berjalan          |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui pemberian wewenang kepada masyarakat, pemberian kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya, pemberian tanggungjawab dan dukungan pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik sudah ada, namun belum berjalan dengan baik. Sedangkan upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri masyarakat, serta meningkatkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai potensi untuk melaksanakannya belum dapat dilakukan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK (Sumber: Hasil Wawancara, Mei 2009). Upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29. Upaya Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta Pendataan Potensi Yang Dimiliki Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Upaya Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sudah diupayakan dan berjalan baik   | 13     | 26         |
| 2      | sudah diupayakan, namun belum berjalan baik  | 25     | 50         |
| 3      | belum/tidak ada upaya sama sekali  | 12     | 24         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK sudah diupayakan, namun belum berjalan baik. Sedangkan pelibatan masyarakat dalam menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30. Keterlibatan Masyarakat Dalam Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta Pendataan Potensi Yang Dimiliki

| No     | Keterlibatan masyarakat dalam menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | sudah diupayakan dan berjalan baik  | 20     | 40         |
| 2      | sudah diupayakan, namun belum berjalan baik   | 25     | 50         |
| 3      | belum/tidak ada upaya sama sekali   | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki sudah diupayakan, namun belum berjalan baik. Adapun pihak yang terlibat dalam



kegiatan menghimpun permasalahan dan pendataan potensi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31. Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun Permasalahan Dan Pendataan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No            | Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun Permasalahan Dan Pendataan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|---------------|---|--------|------------|
| 1             | Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)  | 15     | 30         |
| 2             | Pemerintah Kecamatan  | 20     | 40         |
| 3             | Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)<br>Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)   | 15     | 30         |
| <i>Jumlah</i> |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan menghimpun permasalahan dan pendataan potensi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK umumnya adalah, Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa), Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll). Sedangkan Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll) belum terlibat sepenuhnya.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dilakukan evaluasi. Berkaitan dengan penjelasan tersebut untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.32. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat sering  | 5      | 10         |
| 2      | cukup sering   | 10     | 20         |
| 3      | jarang   | 20     | 40         |
| 4      | tidak pernah   | 15     | 30         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui jarang dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat juga jarang dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Begitu juga dengan tindak lanjut evaluasi dimaksud. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK lebih ditekankan kepada proses yaitu pemberdayaan dilakukan secara terus menerus. Hal ini juga berlaku pada kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK, di mana dalam suatu masyarakat proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui kontak pendamping dan penyuluh dengan masyarakat setelah dilaksanakannya kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.33. Kontak Pendamping dan penyuluh Dengan Masyarakat Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kontak Pendamping dan penyuluh Dengan Masyarakat Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | ya, tetap melakukan hubungan/kontak dengan masyarakat  | 5      | 10         |
| 2      | kadang-kadang saja   | 20     | 40         |
| 3      | tidak pernah lagi  | 25     | 50         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Kontak pendamping dan penyuluh dengan masyarakat setelah dilaksanakannya kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK kadang-kadang saja dilakukan. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat rendahnya kemampuan masyarakat untuk meneruskan pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK setelah tidak didampingi pendamping dan penyuluh lagi. Adapun pendapat warga masyarakat mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kelanjutan pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK pendapat warga masyarakat mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kelanjutan pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.34. Pendapat Warga Masyarakat Mengenai Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kelanjutan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Pendapat Warga Masyarakat Mengenai Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kelanjutan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)  | 13     | 26         |
| 2      | Pemerintah Kecamatan  | 16     | 32         |
| 3      | Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)<br>Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)                   | 23     | 46         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Sebagian besar warga masyarakat berpendapat bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kelanjutan pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll) dan Pemerintah Kecamatan. Bila kelompok sasaran itu adalah suatu masyarakat, maka dalam kondisi masyarakat yang di proses pemberdayaannya sudah berlangsung secara berkesinambungan, permasalahan bukan berarti sudah tidak ada lagi. Dari hal ini, tergambar bahwa proses pemberdayaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK bukan berarti meniadakan masalah, akan tetapi pemberdayaan tersebut mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar dapat bersikap proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada dan dapat muncul dalam masyarakat tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, peran pendamping dan penyuluh sangatlah penting dalam implementasi Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Para pendamping dan penyuluh tersebut diharapkan mampu menggerakkan, mengaktifkan, mendorong dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK (Sumber: Hasil Wawancara, Mei 2009). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui kemampuan pendamping dan penyuluh untuk menggerakkan, mengaktifkan, mendorong dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan



Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.35. Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menggerakkan, Mengaktifkan, Mendorong Dan Mengembangkan Motivasi Warga

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat baik                       | 10     | 20         |
| 2      | cukup baik                        | 15     | 30         |
| 3      | kurang baik                       | 20     | 40         |
| 4      | tidak baik                        | 5      | 10         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui pendamping dan penyuluh dianggap kurang mampu menggerakkan, mengaktifkan, mendorong dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Peran lainnya adalah pendamping dan penyuluh harus mampu menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.36. Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menengahi Dan Mencari Titik Temu Yang Dapat Dikerjakan Bersama Oleh Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat baik                       | 5      | 10         |
| 2      | cukup baik                        | 15     | 30         |
| 3      | kurang baik                       | 20     | 40         |
| 4      | tidak baik                        | 10     | 20         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Kemampuan pendamping dan penyuluh untuk menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam pelaksanaan kebijakan

Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK juga dianggap belum memadai. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan pendamping dan penyuluh jarang memberikan pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK.

Pendamping dan penyuluh diharapkan pula menyediakan waktu bagi Warga bila ingin berbicara guna membahas permasalahan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Para pendamping dan penyuluh sudah menyediakan waktu untuk itu. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan pendamping dan penyuluh memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.37. Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Memanfaatkan Berbagai Keterampilan Dan Sumber Daya Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat mampu                      | 10     | 20         |
| 2      | cukup mampu                       | 15     | 30         |
| 3      | kurang mampu                      | 20     | 40         |
| 4      | tidak mampu                       | 5      | 10         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, sebagian besar menyatakan pendamping dan penyuluh kurang mampu memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Kemampuan pendamping dan penyuluh



untuk mengorganisir (membagi tugas dan pekerjaan) dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38. Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Mengorganisir (Membagi Tugas Dan Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Mengorganisir (Membagi Tugas Dan Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat mampu   | 10     | 20         |
| 2      | cukup mampu  | 20     | 40         |
| 3      | kurang mampu   | 15     | 30         |
| 4      | tidak mampu  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui kemampuan pendamping dan penyuluh untuk mengorganisir (membagi tugas dan pekerjaan) dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK cukup baik. Hal yang penting dalam proses ini adalah, tercapainya suatu kesepakatan. Namun, hal tidak berarti bahwa semua orang (warga masyarakat) harus setuju, apalagi dalam kasus di mana terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, pendamping dan penyuluh diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis, kondusif, dan sinergis dengan masyarakat, dalam rangka menggerakkan potensi masyarakat agar berpartisipasi dalam Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK secara sinergis dan berkesinambungan (Sumber: Hasil Wawancara, Mei 2009). Berkenaan dengan itu, untuk mengetahui kemampuan pendamping dan penyuluh untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan

Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.39. Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat mampu                      | 10     | 20         |
| 2      | cukup mampu                       | 15     | 30         |
| 3      | kurang mampu                      | 20     | 40         |
| 4      | tidak mampu                       | 5      | 10         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar menyatakan pendamping dan penyuluh kurang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Yang dimaksudkan membangkitkan kesadaran masyarakat, yaitu memandu masyarakat untuk dapat melihat suatu alternatif ataupun beberapa alternatif, serta menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial dimana warga dapat berpartisipasi dan bertindak secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK.

Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan pendamping dan penyuluh untuk menyampaikan informasi yaitu menyampaikan informasi dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.40. Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menyampaikan Informasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat mampu                      | 15     | 30         |
| 2      | cukup mampu                       | 20     | 40         |
| 3      | kurang mampu                      | 10     | 20         |
| 4      | tidak mampu                       | 5      | 10         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui sebagian besar menyatakan pendamping dan penyuluh cukup mampu untuk menyampaikan informasi dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Dengan kemampuan tersebut diharapkan pendamping dan penyuluh dapat mengajarkan pada masyarakat bagaimana cara untuk melakukan sesuatu dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Dengan dimilikinya keterampilan tersebut, diharapkan proses pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang**

Aspek penting dalam implementasi kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah partisipasi target group/masyarakat. Tanggapan atau respon masyarakat ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap

pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa

Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.41. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat paham   | 5      | 10         |
| 2      | cukup paham  | 20     | 40         |
| 3      | kurang paham   | 20     | 40         |
| 4      | tidak paham  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui masyarakat belum cukup paham terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Arti penting pemahaman masyarakat tersebut adalah sebagai faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Hasil penelitian ini memperlihatkan secara mental masyarakat bersedia mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Sedangkan kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan guna mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.42. Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Sumbangan Guna Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Sumbangan Guna Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | selalu bersedia   | 10     | 20         |
| 2      | kadang-kadang bersedia  | 30     | 60         |
| 3      | tidak bersedia  | 10     | 20         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.



Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui kadang-kadang saja masyarakat bersedia untuk memberikan sumbangan guna mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Masyarakat secara sukarela bersedia membantu pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Selanjutnya, mengenai kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.43. Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | ada, dan berjalan optimal   | 10     | 20         |
| 2      | ada, tapi tidak berjalan  | 30     | 60         |
| 3      | tidak ada sama sekali   | 10     | 20         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik sudah ada, namun belum berjalan secara optimal. Sedangkan penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44. Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | ada, dan berjalan optimal  | 12     | 24         |
| 2      | ada, tapi tidak berjalan   | 20     | 40         |
| 3      | tidak ada sama sekali  | 18     | 36         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK belum dapat berjalan secara optimal. Penilaian terhadap hasil (manfaat) pembangunan sebaiknya memang dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam masyarakat untuk melakukan penilaian secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Lingkup partisipasi masyarakat yang lainnya adalah pemeliharaan/perawatan masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.45. Pemeliharaan/Perawatan Masyarakat Terhadap Fasilitas Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Pemeliharaan/Perawatan Masyarakat Terhadap Fasilitas Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | ada, dan berjalan optimal   | 20     | 40         |
| 2      | ada, tapi tidak berjalan  | 20     | 40         |
| 3      | tidak ada sama sekali   | 10     | 20         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui pemeliharaan/perawatan masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian menyatakan pemeliharaan sudah ada, namun tidak rutin. Sebagian kecil saja yang menyatakan tidak berjalan sama



sekali. Dalam kaitan tersebut, satu hal yang perlu di ingat bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari keberhasilan fisik saja tetapi harus di lihat juga dari kelangsungan lestariannya suasana dan apakah suasana tersebut berfungsi, bermanfaat dan dipelihara oleh masyarakat.

Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk mencurahkan perhatiannya terhadap segala pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa termasuk dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui keaktifan masyarakat memberikan sumbangan berupa uang dalam berbagai kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.46. Kesiadaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kesiadaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia   | 15     | 30         |
| 2      | sebagian besar bersedia   | 20     | 40         |
| 3      | sebagian kecil bersedia   | 10     | 20         |
| 4      | tidak ada yang bersedia   | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa masyarakat umumnya bersedia menyumbangkan biaya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Sumbangan biaya tersebut umumnya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pembelian bahan, peralatan, biaya konsumsi rapat dan sebagainya. Tidak semua masyarakat diminta sumbangan

biaya, namun pada mereka yang secara ekonomi dianggap mampu memberikan sumbangan biaya. Jenis partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK yang paling tinggi adalah partisipasi dalam hal penyediaan tenaga. Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui keaktifan masyarakat menyumbangkan tenaganya dalam berbagai kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.47. Kesiediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kesiediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia   | 20     | 40         |
| 2      | sebagian besar bersedia   | 10     | 20         |
| 3      | sebagian kecil bersedia   | 5      | 10         |
| 4      | tidak ada yang bersedia   | 15     | 30         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009

Masyarakat cukup aktif menyumbangkan tenaganya dalam berbagai kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik. Sementara itu, dari sisi waktu partisipasi ini belum begitu optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: jarak tempuh yang jauh, sementara fasilitas yang ada tidak memadai. Kesibukan warga; berhubungan dengan mata pencaharian penduduk yang rata-rata adalah bertani, sebagian besar penduduk pada pagi hari bekerja di kebun karet, sementara pada sore hari menggarap ladang masing-masing. Guna mengatasi kendala tersebut, cara yang dilakukan diantaranya adalah, warga yang terpencar di kumpulkan pada suatu tempat, yang umumnya di rumah Kepala



Dusun atau Balai Desa, setiap Kepala Keluarga di data dan diberikan pengarahan dan Motivasi tentang Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Selain itu, juga mendatangi rumah warga pada waktu istirahat siang (sewaktu pulang dari kebun karet) dan tidak jarang dilakukan pendekatan pada malam hari.

Selanjutnya, untuk mengetahui kesediaan masyarakat menyumbangkan alat-alat perlengkapan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.48. Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Alat-Alat Perlengkapan Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Alat-Alat Perlengkapan Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia  | 15     | 30         |
| 2      | sebagian besar bersedia  | 20     | 40         |
| 3      | sebagian kecil bersedia  | 10     | 20         |
| 4      | tidak ada yang bersedia  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui masyarakat bersedia menyumbangkan alat-alat perlengkapan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Hanya saja, untuk sumbangan berupa keterampilan/ keahliannya belum dapat diterapkan. Selanjutnya mengenai kesediaan masyarakat memberikan tanggapan, pendapat, saran, pikiran, prakarsa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 4.49.** Kesiediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Kesiediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia   | 15     | 30         |
| 2      | sebagian besar bersedia   | 20     | 40         |
| 3      | sebagian kecil bersedia   | 10     | 20         |
| 4      | tidak ada yang bersedia   | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Respon masyarakat berupa tanggapan, pendapat, saran, pikiran, prakarsa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik cukup baik. Dengan respon yang cukup baik tersebut tentunya diharapkan dapat memperlancar proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik.

Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK merupakan bagian dari kebijakan pembangunan di bidang pertanian. Guna mendukung kebijakan dimaksud tentunya diperlukan informasi atau sosialisasi mengenai pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.50.** Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan/Menyerap Dan Memberi Tanggapan Terhadap Informasi Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan/Menyerap Dan Memberi Tanggapan Terhadap Informasi Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | sangat tinggi   | 5      | 10         |
| 2      | cukup tinggi  | 20     | 40         |
| 3      | kurang tinggi   | 10     | 20         |
| 4      | rendah  | 15     | 30         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Partisipasi masyarakat Desa Pelaik dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK cukup tinggi. Selanjutnya, mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.51.** Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No     | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat tinggi  | 10     | 20         |
| 2      | cukup tinggi   | 10     | 20         |
| 3      | kurang tinggi  | 20     | 40         |
| 4      | rendah   | 10     | 20         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, mengingat arti penting partisipasi



masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK dengan konsep pemberdayaan masyarakat akan melibatkan seluruh masyarakat desa agar berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan. Dalam pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat berpartisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program tersebut.

Tabel 4.52. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Pendapat Subjek Penelitian |              |            |
|----|--|----------------------------|--------------|------------|
|    |  | Setuju                     | Tidak Setuju | Tidak Tahu |
| 1  | Faktor waktu   | 24                         | 13           | 13         |
| 2  | Faktor menyusun dan membuat pandangan  | 20                         | 19           | 11         |
| 3  | Sikap aparaturnya pelaksana  | 25                         | 11           | 14         |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK terutama dari dimensi waktu. Menurut Camat Kayan Hilir: "Dari dimensi waktu, dimana masyarakat harus mengorbankan waktunya untuk mengikuti kegiatan program tersebut. Jika



masyarakatnya bersedia mengorbankan waktu untuk mensukseskan pelaksanaan program tersebut, maka dimensi waktu merupakan faktor penunjang dan sebaliknya apabila masyarakatnya tidak bersedia mengorbankan waktu untuk mensukseskan pelaksanaan program tersebut, maka dimensi waktu merupakan faktor penghambat” (Sumber: Pedoman Wawancara).

Sedangkan aspek lainnya adalah dari kemampuan dalam menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri. Jika masyarakatnya mampu menyusun dan mengemukakan pandangan, maka ini akan menjadi faktor pendorong dan sebaliknya jika masyarakatnya tidak mampu tentu saja akan merupakan faktor penghambat bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan.

Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan kepercayaan terhadap diri sendiri serta terbatasnya kemampuan dalam menyampaikan pendapatnya. Sikap aparatur adalah masyarakat belum diberi kepercayaan sepenuhnya dalam menentukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan aspirasi dan keperluan yang ada di dalam kelompok masyarakat. Jika masyarakatnya diberikan kepercayaan oleh aparat pemerintah, maka ini akan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK. Sebaliknya jika Aparat Pemerintah tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat, maka ini menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses perencanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK.

Sebagaimana dijelaskan di depan, Dalam pelaksanaan Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK meliputi beberapa proses kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun demikian, dalam tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak jarang ditemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala tertentu. Adapun kendala-kendala Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK di Kecamatan Kayan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.53. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No | Faktor Penghambat  | Pernyataan Subjek Penelitian |              |            |
|----|--|------------------------------|--------------|------------|
|    |  | Setuju                       | Tidak Setuju | Tidak Tahu |
| 1  | Anggaran kurang mencukupi  | 32                           | 0            | 18         |
| 2  | Tidak tersedianya juklak/juknis yang dapat dijadikan acuan dalam Pelaksanaan Program | 19                           | 31           | 0          |
| 3  | Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait                                     | 50                           | 0            | 0          |
| 4  | Jadwal kerja yang belum tersusun secara sistematis                                   | 50                           | 0            | 0          |
| 5  | Sarana dan prasarana tidak memadai   | 50                           | 0            | 0          |
| 6  | Partisipasi masyarakat rendah  | 15                           | 19           | 16         |
| 7  | Metode pendekatan yang dilakukan petugas tidak tepat                                 | 22                           | 17           | 11         |
| 8  | Jumlah petugas belum mencukupi   | 12                           | 22           | 16         |
| 9  | Kualitas petugas rendah  | 16                           | 21           | 13         |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK diantaranya adalah,



anggaran kurang mencukupi, kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait, sarana dan prasarana tidak memadai serta metode pendekatan yang dilakukan petugas tidak tepat. Jadwal kerja yang belum tersusun secara sistematis juga merupakan faktor penghambat. Jadwal tersebut memang sudah ada, namun tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Pelaik.

Selain faktor penghambat pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK juga akan dikemukakan pendukungnya yaitu:

Tabel 4.54. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

| No | Faktor Pendorong   | Pernyataan Subjek Penelitian |              |            |
|----|--|------------------------------|--------------|------------|
|    |  | Setuju                       | Tidak Setuju | Tidak Tahu |
| 1  | Respek masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang   | 33                           | 0            | 17         |
| 2  | Adanya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan   | 30                           | 20           | 0          |
| 3  | Adanya keyakinan masyarakat bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan | 16                           | 11           | 23         |
| 4  | Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan karena kebijakan-kebijakan sebelumnya lebih banyak mendapat penolakan masyarakat   | 23                           | 15           | 12         |
| 1  | persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat   | 50                           | 0            | 0          |
| 2  | isi dan tujuan kebijakan dimengerti oleh masyarakat  | 32                           | 8            | 10         |
| 3  | pelaksanaan kebijakan didukung oleh informasi yang memadai, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat menjadi kelompok sasaran                                    | 19                           | 16           | 15         |
| 4  | pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan   | 15                           | 12           | 23         |
| 5  | pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan   | 9                            | 9            | 32         |
| 6  | pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan   | 10                           | 13           | 27         |

Sumber: Kuesioner Diolah, Mei 2009.



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK oleh Pemerintah Kabupaten Sintang adalah: 1) respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau keputusan; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat sah oleh pejabat melalui prosedur yang telah ditetapkan; 4) sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam mengimplementasikannya. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu : 1) persetujuan, dukungan dan kepercayaan; 2) isi dan tujuan kebijakan yang dimengerti; 3) pelaksanaan yang cukup informasi mengenai kelompok sasaran; 4) pembagian yang efektif dalam pelaksanaan; 5) pembagian wewenang dan; 6) pemberian tugas yang memadai dalam pelaksanaan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan secara efektif. Indikasi hal tersebut adalah kelompok afinitas belum menjadi kelompok mandiri dalam melakukan usaha produktif dan ketahanan pangan sehingga belum berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan), Tim Pangan Desa belum berperan sebagai lembaga koordinasi ketahanan pangan desa, Lembaga Keuangan Desa belum terbentuk serta aksesibilitas (permodalan, pemasaran, informasi, teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan usaha belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik berkaitan partisipasi masyarakat, serta peran pendamping/ penyuluh. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol/pengawasan serta penilaian belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, peran pendamping dan penyuluh dalam implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan optimal.

## **B. Saran**

1. Koordinasi dalam Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir diharapkan dapat ditingkatkan. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan lebih menonjolkan ego sektoral, sehingga dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi kegiatan yang dilakukan.
2. Faktor-faktor yang melingkupi Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik diantaranya adalah partisipasi masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan melibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian/evaluasi. Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan, akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggungjawab baik dalam pelaksanaan maupun kelanjutan program tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, JE. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Wiston,
- Agusyanto, R, dkk. (2006). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Chalid, P. (2007). *Teori Dan Isu Pembangunan*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Danim, S. (1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, WN. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Dillon, H.S dan Hermanto. (1993). *Kemiskinan Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Gibson, I dan Donnelly. (1985). *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, MI. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, P. (2006). *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Jones, C.O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Editor Nashir. B. Jakarta: Rajawali Pres.
- Koentjaraningrat. (1979). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru
- Nugroho, D.R. (2003). *Kebijakan Publik Formulai, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Ndraha, T. (1987). *Partisipasi Masyarakat di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP.
- Ndraha, T. (2003). *Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. (2006). *Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan)*. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Singarimbun, M. dan Effendi (Editor). (1989). *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES
- Sastropetro, R.A.S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

- Supriatna, T. (1985). *Stimulasi Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan
- Sayogyo. (1993). *Pemikiran Tentang Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soenarko. (2000). *Public Policy: Pengertian Pokok Memahami Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)**  
(Ditujukan kepada warga masyarakat di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir  
Kabupaten Sintang sebanyak 50 orang)

Dalam rangka mengumpulkan data bagi penyusunan tesis yang berjudul: Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk dapat kiranya menjawab pertanyaan yang tersedia di bawah ini.  
Atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) saya ucapkan terima kasih.

**IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN**

- 1 Nama : .....
- . : .....
- 2 Umur : .....
- . : .....
- 3 Jenis : .....
- . Kelamin : .....
- 4 Jabatan : .....
- . : .....
- 5 Alamat : .....
- . : .....

**PETUNJUK PENGISIAN**

- a. Sebelum menjawab bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama.
- b. Pilihlah salah satu dari jawaban yang tersedia dan berilah tanda silang (X) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr(i).
- c. Untuk pertanyaan yang berbentuk table silahkan menulis langsung dengan memberikan tanda chek list (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan.
- d. Jawablah semua pertanyaan secara jujur menurut situasi dan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr(i) anggap benar.



1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK pemerintah berkewajiban melaksanakannya melalui pemberdayaan masyarakat?
  - a. sangat mengetahui
  - b. cukup mengetahui
  - c. kurang mengetahui
  - d. tidak mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
  - a. sangat mengetahui
  - b. cukup mengetahui
  - c. kurang mengetahui
  - d. tidak mengetahui
3. Jika Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui, dari mana saja informasi tersebut di dapat?
  - a. dari Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
  - b. dari pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)
  - c. dari media massa (radio, Koran, televisi)
  - d. dari Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dll)
  - e. dari tetangga/teman/keluarga
4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) setuju jika pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK berbentuk “program” (bila Program itu selesai maka dianggap Pemberdayaan sudah selesai dilakukan)?
  - a. sangat setuju
  - b. setuju
  - c. cukup setuju
  - d. kurang setuju
  - e. tidak setuju
  - f. sangat tidak setuju
5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) setuju jika pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK berbentuk “proses” (pemberdayaan dilakukan secara terus menerus)?
  - a. sangat setuju
  - b. setuju
  - c. cukup setuju
  - d. kurang setuju
  - e. tidak setuju
  - f. sangat tidak setuju
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah melibatkan masyarakat?
  - a. selalu melibatkan masyarakat
  - b. kadang-kadang saja melibatkan masyarakat
  - c. tidak pernah melibatkan masyarakat

7. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan perencanaan tersebut?
  - a. Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
  - b. pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)
  - c. Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dll)
  - d. Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)
8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK masyarakat telah diajak berdiskusi mengenai kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan?
  - a. selalu berdiskusi dengan masyarakat
  - b. kadang-kadang saja berdiskusi dengan masyarakat
  - c. tidak pernah berdiskusi dengan masyarakat
9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK masyarakat telah diajak menyusun gagasan, ide dan saran mereka secara tertulis?
  - a. ya, selalu diajak
  - b. kadang-kadang saja diajak
  - c. tidak pernah diajak
10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK, gagasan, ide dan saran masyarakat telah dicantumkan pula tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut?
  - a. ya, telah dicantumkan
  - b. tidak dicantumkan
  - c. tidak tahu
11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kerja sama antara Petugas dan Warga Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
  - a. sangat baik
  - b. baik
  - c. kurang baik
  - d. tidak baik
12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah sesuai sebagaimana direncanakan sebelumnya?
  - a. sangat sesuai
  - b. kurang sesuai
  - c. tidak sesuai
13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK pernah terjadi pertentangan antar Kelompok Warga?
  - a. sangat sering
  - b. cukup sering
  - c. jarang
  - d. tidak pernah

14. Jika pernah terjadi pertentangan antar Kelompok Warga, bagaimanakah cara penyelesaiannya?
  - a. melalui musyawarah/mufakat
  - b. melalui hukum adat
  - c. melaporkan ke polisi
  - d. tidak pernah diselesaikan
15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah diupayakan terciptanya suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang ?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
16. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah diupayakan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
17. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah diupayakan perlindungan terhadap masyarakat ?.
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
18. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah adanya pemberian wewenang kepada masyarakat ?.
  - a. ada, dan berjalan baik
  - b. ada, tapi belum berjalan
  - c. belum/tidak ada sama sekali
19. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah adanya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri masyarakat?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
20. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah adanya upaya meningkatkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai potensi untuk melaksanakannya?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali



21. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah adanya pemberian kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya?
  - a. ada, dan berjalan baik
  - b. ada, tapi belum berjalan
  - c. belum/tidak ada sama sekali
22. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah adanya pemberian tanggungjawab pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu?
  - a. ada, dan berjalan baik
  - b. ada, tapi belum berjalan
  - c. belum/tidak ada sama sekali
23. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah adanya pemberian dukungan pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu?
  - a. ada, dan berjalan baik
  - b. ada, tapi belum berjalan
  - c. belum/tidak ada sama sekali
24. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah dilaksanakan upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi masyarakat?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
25. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah dilaksanakan upaya pendataan potensi yang dimiliki masyarakat?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
26. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah upaya menghimpun permasalahan dan pendataan potensi tersebut melibatkan masyarakat?
  - a. sudah diupayakan dan berjalan baik
  - b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
  - c. belum/tidak ada upaya sama sekali
27. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menghimpun permasalahan dan pendataan potensi tersebut?
  - a. Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
  - b. pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)
  - c. Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dll)
  - d. Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)

28. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dari permasalahan yang berhasil dihimpun tersebut telah disusun prioritas yang akan ditindaklanjuti?
- sudah
  - belum
  - tidak tahu
29. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- sangat sering
  - cukup sering
  - jarang
  - tidak pernah
30. Apakah evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK melibatkan masyarakat?
- selalu melibatkan masyarakat
  - kadang-kadang saja melibatkan masyarakat
  - tidak pernah melibatkan masyarakat
31. Apakah hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK selalu ditindaklanjuti kembali?
- seluruhnya ditindak lanjuti
  - sebagian besar ditindaklanjuti
  - sebagian kecil ditindaklanjuti
  - tidak ditindaklanjuti
32. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah setelah dilaksanakannya kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK Petugas tetap melakukan hubungan dengan masyarakat?
- ya, tetap melakukan hubungan dengan masyarakat
  - kadang-kadang saja
  - tidak pernah lagi
33. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan masyarakat untuk meneruskan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK setelah tidak didampingi petugas lagi?
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
34. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah setelah dilaksanakannya kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK pemerintah tetap melakukan pemantauan kelanjutan pelaksanaannya oleh masyarakat?
- tetap dilakukan dan sering
  - tetap dilakukan tapi jarang sekali
  - tidak dilakukan lagi

35. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) siapakah yang bertanggungjawab atas kelanjutan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
  - pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)
  - Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dll)
  - Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)
32. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- sangat paham
  - cukup paham
  - kurang paham
  - tidak paham
33. Apakah pemahaman masyarakat tersebut dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- sangat mendukung
  - cukup mendukung
  - kurang mendukung
  - tidak mendukung
34. Apakah partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peranserta masyarakat terhadap kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK, merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan termasuk keterlibatan secara jasmaniah?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
35. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK masyarakat bersedia memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kebijakan tersebut?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
36. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK terdapat rasa kesenangan dan kesukarelaan masyarakat untuk membantu ?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
37. Apakah masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada

38. Apakah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK merupakan kehendak sendiri?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
39. Apakah keterlibatan masyarakat selalu mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMU?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
40. Apakah masyarakat selalu melakukan kontrol/pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
41. Apakah masyarakat selalu melakukan penilaian terhadap hasil/manfaat pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
42. Apakah masyarakat dapat memanfaatkan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
43. Apakah masyarakat melakukan pemeliharaan/perawatan dari pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada
44. Apakah masyarakat dapat mengembangkan hasil pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- seluruhnya
  - sebagian besar saja
  - sebagian kecil
  - tidak ada



45. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan biaya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
46. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan tenaga dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
47. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan waktunya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
48. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan alat-alat perlengkapan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan)?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
49. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan keterampilan/ keahliannya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
50. Apakah masyarakat selalu memberikan tanggapan, pendapat, saran, pikiran, prakarsa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- selalu bersedia
  - kadang-kadang bersedia
  - tidak bersedia
51. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- sangat tinggi
  - cukup tinggi
  - kurang tinggi
  - rendah

52. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
- sangat tinggi
  - cukup tinggi
  - kurang tinggi
  - rendah
53. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
- sangat tinggi
  - cukup tinggi
  - kurang tinggi
  - rendah
54. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
- sangat tinggi
  - cukup tinggi
  - kurang tinggi
  - rendah
55. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk menggerakkan, mengaktifkan, mendorong dan mengembangkan Motivasi Warga untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
56. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
57. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah petugas pernah memberikan pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat sering
  - cukup sering
  - jarang
  - tidak pernah

58. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah petugas selalu menyediakan waktu bagi Warga bila mereka ingin berbicara guna membahas permasalahan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat sering
  - cukup sering
  - jarang
  - tidak pernah
59. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk memanfaatkan berbagai Keterampilan dan Sumber Daya masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
60. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk mengorganisir (membagi tugas dan pekerjaan) dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
61. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk Membangkitkan Kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
62. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk Menyampaikan informasi yaitu menyampaikan Informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu
63. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kemampuan petugas untuk mengajarkan pada masyarakat bagaimana cara untuk melakukan sesuatu dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
- sangat mampu
  - cukup mampu
  - kurang mampu
  - tidak mampu

### TRANSKRIP KUESIONER

**Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat mengetahui  | 15     | 30         |
| 2      | cukup mengetahui   | 5      | 10         |
| 3      | kurang mengetahui  | 25     | 50         |
| 4      | tidak mengetahui   | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Perolehan Informasi Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Perolehan Informasi Mengenai Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | dari Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)   | 10     | 20         |
| 2      | dari Pemerintah Kecamatan (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)  | 20     | 40         |
| 3      | dari media massa (radio, koran, televisi)   | 5      | 10         |
| 4      | dari Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)  | 10     | 20         |
| 5      | dari tetangga/teman/keluarga  | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | selalu melibatkan masyarakat  | 21     | 42         |
| 2      | kadang-kadang saja melibatkan masyarakat  | 25     | 50         |
| 3      | tidak pernah melibatkan masyarakat  | 4      | 8          |
| Jumlah |   | 50     | 100        |



**Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)  | 20     | 40         |
| 2      | Pemerintah Kecamatan  | 15     | 30         |
| 3      | Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)   | 10     | 20         |
| 4      | Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)                                | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Proses Diskusi Dengan Masyarakat Mengenai Kegiatan Apa Saja Yang Tepat Dilaksanakan Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Proses Diskusi Dengan Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | selalu berdiskusi dengan masyarakat  | 20     | 40         |
| 2      | kadang-kadang saja berdiskusi dengan masyarakat  | 25     | 50         |
| 3      | tidak pernah berdiskusi dengan masyarakat  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | sangat sering   | 15     | 30         |
| 2      | cukup sering  | 15     | 30         |
| 3      | jarang  | 15     | 30         |
| 4      | tidak pernah  | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | ya, seluruhnya diakomodasi/ditampung  | 12     | 24         |
| 2      | sebagian besar diakomodasi/ditampung  | 5      | 10         |
| 3      | sebagian kecil diakomodasi/ditampung  | 30     | 60         |
| 4      | tidak ada yang diakomodasi/ditampung  | 3      | 6          |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Kerja Sama Antara Pendamping dan penyuluh Dan Warga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kerja Sama Antara Pendamping dan penyuluh Dan Warga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat baik  | 15     | 30         |
| 2      | baik   | 15     | 30         |
| 3      | kurang baik  | 15     | 30         |
| 4      | tidak baik   | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Suasana Atau Iklim Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Untuk Berkembang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Suasana Atau Iklim Yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Untuk Berkembang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sudah diupayakan dan berjalan baik   | 15     | 30         |
| 2      | sudah diupayakan, namun belum berjalan baik  | 30     | 60         |
| 3      | belum/tidak ada upaya sama sekali  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK Di Desa Pelaik**

| No | Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat  | Keterangan                        |
|----|--|-----------------------------------|
| 1  | Pemberian wewenang kepada masyarakat   | ada, tapi belum berjalan          |
| 2  | Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat  | belum/tidak ada upaya sama sekali |
| 3  | Meningkatkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai potensi untuk melaksanakannya  | belum/tidak ada upaya sama sekali |
| 4  | Pemberian kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya | ada, tapi belum berjalan          |
| 5  | Pemberian tanggungjawab pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu  | ada, tapi belum berjalan          |
| 6  | Pemberian dukungan pada masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu       | ada, tapi belum berjalan          |

**Upaya Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta Pendataan Potensi Yang Dimiliki Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Upaya Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sudah diupayakan dan berjalan baik   | 13     | 26         |
| 2      | sudah diupayakan, namun belum berjalan baik  | 25     | 50         |
| 3      | belum/tidak ada upaya sama sekali  | 12     | 24         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Keterlibatan Masyarakat Dalam Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta Pendataan Potensi Yang Dimiliki**

| No     | Keterlibatan masyarakat dalam menghimpun permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi yang dimiliki pelaksanaan kegiatan kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | sudah diupayakan dan berjalan baik  | 20     | 40         |
| 2      | sudah diupayakan, namun belum berjalan baik   | 25     | 50         |
| 3      | belum/tidak ada upaya sama sekali   | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun Permasalahan Dan Pendataan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun Permasalahan Dan Pendataan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|---|-----------|------------|
| 1             | Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)  | 13        | 26         |
| 2             | Pemerintah Kecamatan  | 20        | 40         |
| 3             | Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)   | 15        | 30         |
| 4             | Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dli)  | 2         | 4          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|--|-----------|------------|
| 1             | sangat sering  | 5         | 10         |
| 2             | cukup sering   | 10        | 20         |
| 3             | jarang   | 20        | 40         |
| 4             | tidak pernah   | 15        | 30         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Kontak Pendamping dan penyuluh Dengan Masyarakat Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Kontak Pendamping dan penyuluh Dengan Masyarakat Setelah Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|--|-----------|------------|
| 1             | ya, tetap melakukan hubungan/kontak dengan masyarakat  | 5         | 10         |
| 2             | kadang-kadang saja   | 20        | 40         |
| 3             | tidak pernah lagi  | 25        | 50         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>50</b> | <b>100</b> |



**Pendapat Warga Masyarakat Mengenai Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kelanjutan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Pendapat Warga Masyarakat Mengenai Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kelanjutan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|---|-----------|------------|
| 1             | Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)  | 11        | 22         |
| 2             | Pemerintah Kecamatan  | 16        | 32         |
| 3             | Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, dll)   | 21        | 42         |
| 4             | Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)  | 2         | 4          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menggerakkan, Mengaktifkan, Mendorong Dan Mengembangkan Motivasi Warga**

| No            | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1             | sangat baik                       | 10        | 20         |
| 2             | cukup baik                        | 15        | 30         |
| 3             | kurang baik                       | 20        | 40         |
| 4             | tidak baik                        | 5         | 10         |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menengahi Dan Mencari Titik Temu Yang Dapat Dikerjakan Bersama Oleh Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat**

| No            | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1             | sangat baik                       | 5         | 10         |
| 2             | cukup baik                        | 15        | 30         |
| 3             | kurang baik                       | 20        | 40         |
| 4             | tidak baik                        | 10        | 20         |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Memanfaatkan Berbagai Keterampilan Dan Sumber Daya Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat mampu                      | 10     | 20         |
| 2      | cukup mampu                       | 15     | 30         |
| 3      | kurang mampu                      | 20     | 40         |
| 4      | tidak mampu                       | 5      | 10         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

**Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Mengorganisir (Membagi Tugas Dan Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Mengorganisir (Membagi Tugas Dan Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat mampu   | 10     | 20         |
| 2      | cukup mampu  | 20     | 40         |
| 3      | kurang mampu   | 15     | 30         |
| 4      | tidak mampu  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1      | sangat mampu                      | 10     | 20         |
| 2      | cukup mampu                       | 15     | 30         |
| 3      | kurang mampu                      | 20     | 40         |
| 4      | tidak mampu                       | 5      | 10         |
| Jumlah |                                   | 50     | 100        |

**Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menyampaikan Informasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Kemampuan Pendamping dan penyuluh | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1             | sangat mampu                      | 15        | 30         |
| 2             | cukup mampu                       | 20        | 40         |
| 3             | kurang mampu                      | 10        | 20         |
| 4             | tidak mampu                       | 5         | 10         |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|--|-----------|------------|
| 1             | sangat paham   | 5         | 10         |
| 2             | cukup paham  | 20        | 40         |
| 3             | kurang paham   | 20        | 40         |
| 4             | tidak paham  | 5         | 10         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Sumbangan Guna Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No            | Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Sumbangan Guna Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah    | Prosentase |
|---------------|---|-----------|------------|
| 1             | selalu bersedia   | 10        | 20         |
| 2             | kadang-kadang bersedia  | 30        | 60         |
| 3             | tidak bersedia  | 10        | 20         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>50</b> | <b>100</b> |

**Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | ada, dan berjalan optimal   | 10     | 20         |
| 2      | ada, tapi tidak berjalan  | 30     | 60         |
| 3      | tidak ada sama sekali   | 10     | 20         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | ada, dan berjalan optimal  | 12     | 24         |
| 2      | ada, tapi tidak berjalan   | 20     | 40         |
| 3      | tidak ada sama sekali  | 18     | 36         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Pemeliharaan/Perawatan Masyarakat Terhadap Fasilitas Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Pemeliharaan/Perawatan Masyarakat Terhadap Fasilitas Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | ada, dan berjalan optimal   | 20     | 40         |
| 2      | ada, tapi tidak berjalan  | 20     | 40         |
| 3      | tidak ada sama sekali   | 10     | 20         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |



**Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia   | 15     | 30         |
| 2      | sebagian besar bersedia   | 20     | 40         |
| 3      | sebagian kecil bersedia   | 10     | 20         |
| 4      | tidak ada yang bersedia   | 5      | 10         |
| Jumlah |   | 50     | 100        |

**Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia  | 20     | 40         |
| 2      | sebagian besar bersedia  | 10     | 20         |
| 3      | sebagian kecil bersedia  | 5      | 10         |
| 4      | tidak ada yang bersedia  | 15     | 30         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Alat-Alat Perlengkapan Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Alat-Alat Perlengkapan Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia  | 15     | 30         |
| 2      | sebagian besar bersedia  | 20     | 40         |
| 3      | sebagian kecil bersedia  | 10     | 20         |
| 4      | tidak ada yang bersedia  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Kesediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Kesediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | seluruhnya bersedia  | 15     | 30         |
| 2      | sebagian besar bersedia  | 20     | 40         |
| 3      | sebagian kecil bersedia  | 10     | 20         |
| 4      | tidak ada yang bersedia  | 5      | 10         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan/Menyerap Dan Memberi Tanggapan Terhadap Informasi Yang Berknaan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan/Menyerap Dan Memberi Tanggapan Terhadap Informasi Yang Berknaan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat tinggi  | 5      | 10         |
| 2      | cukup tinggi   | 20     | 40         |
| 3      | kurang tinggi  | 10     | 20         |
| 4      | rendah   | 15     | 30         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No     | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Jumlah | Prosentase |
|--------|--|--------|------------|
| 1      | sangat tinggi  | 10     | 20         |
| 2      | cukup tinggi   | 10     | 20         |
| 3      | kurang tinggi  | 20     | 40         |
| 4      | rendah   | 10     | 20         |
| Jumlah |  | 50     | 100        |

**Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK | Pendapat Subjek Penelitian |              |            |
|----|--|----------------------------|--------------|------------|
|    |  | Setuju                     | Tidak Setuju | Tidak Tahu |
| 1  | Faktor waktu   | 24                         | 13           | 13         |
| 2  | Faktor menyusun dan membuat pandangan  | 20                         | 19           | 11         |
| 3  | Sikap aparaturnya pelaksana  | 25                         | 11           | 14         |

**Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No | Faktor Penghambat  | Pernyataan Subjek Penelitian |              |            |
|----|--|------------------------------|--------------|------------|
|    |  | Setuju                       | Tidak Setuju | Tidak Tahu |
| 1  | Anggaran kurang mencukupi  | 32                           | -            | 18         |
| 2  | Tidak tersedianya juklak/juknis yang dapat dijadikan acuan dalam Pelaksanaan Program | 19                           | 31           | -          |
| 3  | Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait                                     | 50                           | -            | -          |
| 4  | Jadwal kerja yang belum tersusun secara sistematis                                   | 50                           | -            | -          |
| 5  | Sarana dan prasarana tidak memadai   | 50                           | -            | -          |
| 6  | Partisipasi masyarakat rendah  | 15                           | 19           | 16         |
| 7  | Metode pendekatan yang dilakukan petugas tidak tepat                                 | 22                           | 17           | 11         |
| 8  | Jumlah petugas belum mencukupi   | 12                           | 22           | 16         |
| 9  | Kualitas petugas rendah  | 16                           | 21           | 13         |

**Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK**

| No | Faktor Pendorong   | Pernyataan Subjek Penelitian |              |            |
|----|--|------------------------------|--------------|------------|
|    |  | Setuju                       | Tidak Setuju | Tidak Tahu |
| 1  | Respek masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang   | 33                           | -            | 17         |
| 2  | Adanya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan   | 30                           | 20           | -          |
| 3  | Adanya keyakinan masyarakat bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan | 16                           | 11           | 23         |
| 4  | Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan karena kebijakan-kebijakan sebelumnya lebih banyak mendapat penolakan masyarakat   | 23                           | 15           | 12         |
| 1  | persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat   | 50                           | -            | -          |
| 2  | isi dan tujuan kebijakan dimengerti oleh masyarakat  | 32                           | 8            | 10         |
| 3  | pelaksanaan kebijakan didukung oleh informasi yang memadai, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat menjadi kelompok sasaran                                    | 19                           | 16           | 15         |
| 4  | pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan   | 15                           | 12           | 23         |
| 5  | pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan   | 9                            | 9            | 32         |
| 6  | pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan   | 10                           | 13           | 27         |



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik?
3. Apakah bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik telah disosialisasikan kepada warga masyarakat?
4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap bentuk pemberdayaan tersebut?
5. Apa saja yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
6. Bagaimanakah tata cara pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
7. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah dilaksanakan upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi masyarakat?.
8. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah dilaksanakan upaya pendataan potensi yang dimiliki masyarakat?.
9. Apakah upaya menghimpun permasalahan dan pendataan potensi tersebut melibatkan masyarakat?.
10. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menghimpun permasalahan dan pendataan potensi tersebut?
11. Apakah dari permasalahan yang berhasil dihimpun tersebut telah disusun prioritas yang akan ditindaklanjuti?.
12. Apakah pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
13. Bagaimana kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK diimplementasikan?
14. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK tersebut?
15. Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
16. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa dalam implementasi kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
17. Bagaimana cara kerja birokrasi dalam proses pelaksanaan program Mandiri Pangan melalui PMUK?
18. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Mandiri Pangan melalui PMUK?

19. Bagaimana tanggapan target group/masyarakat terhadap Mandiri Pangan melalui PMUK?
20. Jenis partisipasi apa saja yang diberikan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
21. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi tersebut?
22. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
23. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
24. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
25. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
26. Peran-peran fasilitatif apa saja yang harus dilakukan petugas dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
27. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksanakan peran fasilitatif tersebut?
28. Peran-peran edukasional apa saja yang harus dilakukan petugas dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
29. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksanakan peran edukasional tersebut?

## TRANSKRIP PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik?

**Jawaban:** Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses untuk meningkatkan partisipasi, demokratisasi, pengembangan kapasitas, pengembangan ekonomi dan pengembangan individu

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik?

**Jawaban:** Kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di pedesaan. Penumbuhan kelembagaan di pedesaan meliputi : kelompok afinitas, Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa dengan didukung infrastruktur pedesaan diharapkan mampu mengembangkan sistem ketahanan pangan dengan melaksanakan subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan rumah tangga, berkembangnya usaha produktif dan berkembang pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman.

3. Apakah bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik telah disosialisasikan kepada warga masyarakat?

**Jawaban:** Sudah

4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap bentuk pemberdayaan tersebut?

**Jawaban:** Pada umumnya cukup baik.

5. Apa saja yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

**Jawaban:** Ada sepuluh alasan yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK, yaitu: (1). masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan sumberdaya lahan, sehingga tidak berusaha di sektor pertanian; (2). masih adanya kemiskinan struktural, sehingga meskipun telah berusaha tetapi pendapatan yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan keluarga; (3). minimnya sarana dan prasarana (pengairan, jalan desa, sarana usahatani, air bersih, listrik dan pasar); (4). terbatasnya pengetahuan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; (5). belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat/kelempoktani; (6). Terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga permodalan; (7). Rendahnya akses terhadap lembaga pemasaran;

- (8).terbatasnya akses informasi dan teknologi; (9). rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; dan (10). terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan
6. Bagaimanakah tata cara pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

**Jawaban:** Program Aksi Desa Mandiri Pangan dirancang dalam kurun waktu 4 tahun, melalui 4 tahapan yang diharapkan mencapai kemandirian. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap penumbuhan, (3) tahap pengembangan dan (4) tahap kemandirian. *Tahap persiapan*, antara lain : seleksi desa rawan pangan, terbentuknya kelompok KK miskin sasaran, data base karakteristik kemasyarakatan, dan profil desa yang menggambarkan kondisi potensi dan permasalahan ketahanan pangan serta perencanaan pembangunan desa partisipatif yang dikoordinasikan oleh Pendamping, Tim Pangan Desa (TPD) dan Aparat desa setempat. *Pada tahap penumbuhan*, mulai ditumbuhkan usaha-usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok afinitas, kelompok wanita dan kelompok lumbung pangan. Pada tahap ini mulai ditumbuhkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai lembaga layanan modal, berfungsinya posyandu dan kader gizi serta bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana dalam ketahanan pangan wilayah pedesaan. *Pada tahap pengembangan*, terdapat peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif dan modal sosial kemasyarakatan yang mengarah pada peningkatan skala usaha, peningkatan modal yang dikelola masyarakat dalam wadah LKD, pembangunan sarana prasarana wilayah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang dikoordinasikan oleh TPD sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan desa. Sedangkan *tahap kemandirian* ditunjukkan adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif yang mampu meningkatkan daya beli dan meningkatnya jaringan kemitraan yang ditandai munculnya usaha kecil, usaha mikro pedesaan di bidang pangan dan non pangan serta tumbuhnya gapoktan yang mandiri dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal. Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Serta berfungsinya TPD yang mampu menggerakkan dan engkoordinasikan program-program pembangunan ketahanan pangan desa, yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usahatani melalui program lintas sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya



7. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah dilaksanakan upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi masyarakat?  
**Jawaban:** Sudah
8. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah dilaksanakan upaya pendataan potensi yang dimiliki masyarakat?  
**Jawaban:** Sudah
9. Apakah upaya menghimpun permasalahan dan pendataan potensi tersebut melibatkan masyarakat?  
**Jawaban:** Ya
10. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menghimpun permasalahan dan pendataan potensi tersebut?  
**Jawaban:** Pemerintah desa dan tokoh masyarakat
11. Apakah dari permasalahan yang berhasil dihimpun tersebut telah disusun prioritas yang akan ditindaklanjuti?  
**Jawaban:** Sudah
12. Apakah pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Pernah dan rutin
13. Bagaimana kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK diimplementasikan?  
**Jawaban:** (a). Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, (b). Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan stake holder untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. (c). Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel. (d). Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan. (e). Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. (f). Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
14. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK tersebut?  
**Jawaban:** Pemerintah Desa, Lembaga sosial dan seluruh warga masyarakat desa yang bersangkutan.
15. Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam penerapan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Sangat baik
16. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa secara formal lebih berkuasa dalam implementasi kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Tim Pangan Desa (TPD) dan Aparat desa setempat

17. Bagaimana cara kerja birokrasi dalam proses pelaksanaan program Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Cukup baik
18. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan
19. Bagaimana tanggapan target group/masyarakat terhadap Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Cukup baik dan antusias
20. Jenis partisipasi apa saja yang diberikan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Pikiran, tenaga dan waktu
21. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi tersebut?  
**Jawaban:** Sangat baik
22. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Sangat baik
23. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?  
**Jawaban:** Sangat baik
24. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?  
**Jawaban:** Sangat baik
25. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?  
**Jawaban:** Sangat baik
26. Peran-peran fasilitatif apa saja yang harus dilakukan petugas dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.  
**Jawaban:** Tugas Pendamping pada tahap persiapan, adalah menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas. Mengembangkan dinamika kelompok (organisasi, administrasi, tabungan kelompok). Membina kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif. Menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok. Membuat database : pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, profil desa
27. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksanakan peran fasilitatif tersebut?  
**Jawaban:** Sangat baik

28. Peran-peran edukasional apa saja yang harus dilakukan petugas dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

**Jawaban:** Tugas Pendamping pada Tahap Penumbuhan adalah mengembangkan dinamika kelompok afinitas, menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif kelompok, meliputi usaha *on farm*, *off farm*, maupun *nonfarm*. menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan P2KPG untuk kelompok wanita, usaha tepung-tepungan dan anak SD/MI serta kelompok lumbung pangan masyarakat bersama Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten; bersama Tim Pangan Desa menyusun materi/bahan penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; bersama Tim Pangan Desa menyusun menu makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat; mendampingi kelompok dalam menyusun rencana, jadwal kegiatan, sosialisasi, demonstrasi, dan pengembangan pekarangan; penguatan kapasitas kesehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan jaringan usaha, penerapan teknologi tepat guna, pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulan

29. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksanakan peran edukasional tersebut?

**Jawaban:** Sangat baik

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588**

**BIODATA**

**Nama** : **Sonny Wijaya**  
**NIM** : **014965793**  
**Tempat dan Tanggal Lahir** : **Bone, 02 April 1967**  
**Registrasi Pertama** : **2007.2**  
**Riwayat Pendidikan** : **1. Tamat SD Muhammadiyah Ujung Pandang Tahun 1980**  
**2. Tamat SMP Hos Cokroaminoto Ujung Pandang Tahun 1983**  
**3. Tamat SMA Karika Chandra Kirana Ujung Pandang Tahun 1986**  
**4. Tamat S-1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin Ujung Pandang Tahun 1992**  
**5. Masuk Program S-2 MAP UT Tahun 2007.2**

**Riwayat Pekerjaan** : **1. PNS Dinas Pertanian Tahun 2000**  
**2. Plt. Kasi Bina Usaha Perikanan Tahun 2003**  
**3. Kasi Bina Usaha Tanaman Pangan Tahun 2005**  
**4. Kasubid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang sejak Februari 2009 – sekarang.**

**Alamat Tetap** : **Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Rt.3/Rw.01 No.2 Ds. Baning Kota Sintang, 78611 Kalimantan Barat**

**Telp. / HP** : **0852 – 451 – 72029**

**Sintang, Agustus 2009**

**SONNY WIJAYA  
NIM. 014965793**





# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KAYAN HILIR

SINTANG 78611

## SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor :

Dasar surat Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Pontianak Nomor : 0296/H31.43/AK/2009 tanggal 4 April 2009 perihal Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) pada Camat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Sehubungan hal tersebut, Camat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang memberikan izin kepada :

Nama : **SONNY WIJAYA**  
 NIM : **014965793**  
 Program Studi : **Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik**

Untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang", dengan ketentuan setelah selesai melakukan penelitian agar melapor kembali kepada Camat Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut diharapkan kepada saudara yang unit kerjanya menjadi tempat penelitian agar dapat membantu pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 14 April 2009

Camat Kecamatan Kayan Hilir  
Kabupaten Sintang

**ULIDAL MUHTAR, S.Sos**  
Pembina

NIP. 19670803 198803 1 009

Terbusan :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka di Jakarta
2. Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak di Pontianak
3. Kepala Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang